

BAB III

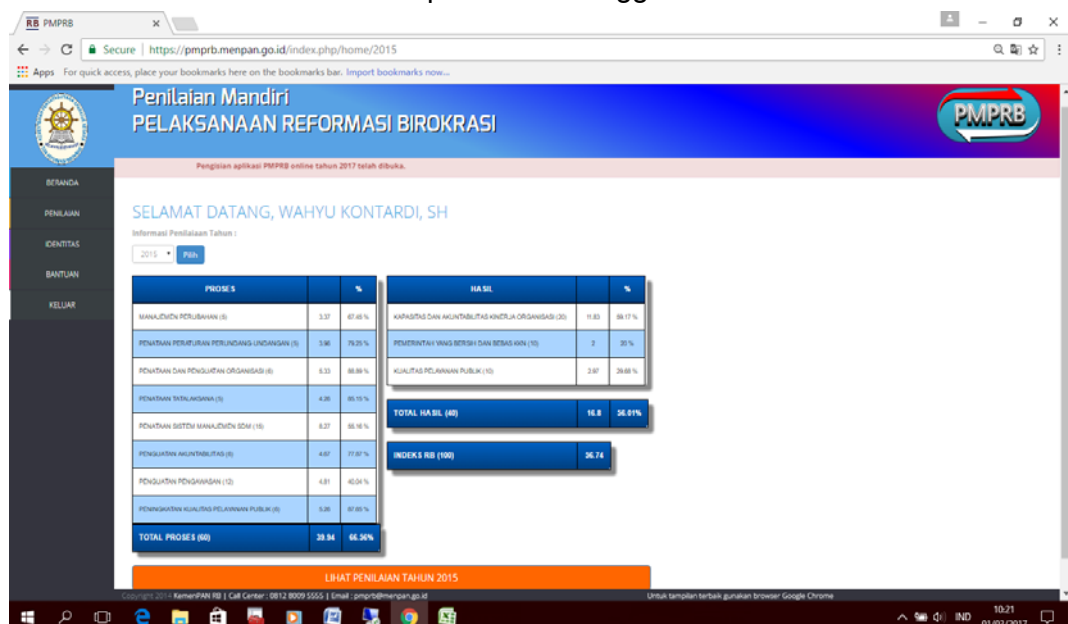
AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan. Pada tahun 2016 yang merupakan tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah (RPJMD) 2016-2021, Pemerintah Kabupaten Purbalingga secara bertahap dan konsisten telah berupaya mewujudkan misi dan tujuannya melalui 36 (tiga puluh enam) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Perubahan Perjanjian Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2016.

A. CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PURBALINGGA

Berdasarkan kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2015 yang merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri oleh Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan penilaian tersebut, pemenuhan target indikator internal yang mencerminkan pencapaian program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga adalah 56,74%

Gambar 3.1 Hasil PMPRB Kabupaten Purbalingga



B. PENILAIAN TINGKAT MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Berdasarkan laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Nomor : LAP-841/ PW11/ 3/ 2016 tanggal 1 November 2016 tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Kabupaten Purbalingga berada pada level “rintisan” atau tingkat 3 dari 6 tingkat maturitas SPIP. Pengukuran terhadap 25 fokus penilaian maturitas menghasilkan nilai maturitas SPIP Kabupaten Purbalingga sebesar “1,898”.

Dengan tingkat maturitas “rintisan” maka karekteristik Penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Purbalingga :

1. **Belum** sepenuhnya menetapkan kebijakan dan prsedur pengendalian untuk **beberapa** pokok Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
2. **Belum** sepenuhnya melakukan identifikasi risiko dan memetakan seluruh risiko tujuan organisasi
3. **Telah** melaksanakan kebijakan dan prosedur atas kegiatan pokok Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) namun belum sepenuhnya mengkomunikasikan dan mendokumentasikan secara konsisten
4. **Belum** sepenuhnya melakukan evaluasi atas efektifitas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian atas **beberapa** kegiatan pokok unit organisasi dalam Pemerintah Purbalingga secara berkala dan terdomentasi
5. **Belum** sepenuhnya melakukan pementauan yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan **beberapa** kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer

C. REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA

Realisasi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga sudah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2016 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1 Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2016 terhadap target akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2016	CAPAIAN 2016	Target Akhir RPJMD 2016 - 2021
1	2	3	4	5
Indeks Kepuasan Masyarakat (IPM)	Indeks	78	77,96	80,5
Opini audit keuangan BPK	Opini	WDP	-	WTP
Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	persen	87,5	90,63	96
Persentase pelanggaran Perda yang ditangani	persen	100	100	100
Persentase korban bencana yang terlayani	persen	100	100	100
Persentase bencana kebakaran yang terlayani	persen	35	285,77	60
Partisipasi masyarakat dalam Pemilu	persen	-	-	-
Skor Pola Pangan Harapan	Skor	87	82,5	91
Ketersediaan Pangan Utama	kg/kap/th	165	152,19	175
Persentase rumah layak huni	Persen	89,4	88,58	93,8
Persentase kepemilikan rumah	Persen	81,62	80,15	89,12
Harapan lama sekolah	Angka	11,9	11,78	12,9
Rata2 lama sekolah	Tahun	6,96	6,85	7,92
APK SD/Sederajat	Angka	109	110,34	110
APK SMP/Sederajat	Angka	100	100,36	100
APM SD/Sederajat	Angka	92	92,61	94
APM SMP/ Sederajat	Angka	70	69,40	73
Usia Harapan Hidup	tahun	72,9	72,29	73,4
Angka Kematian Ibu	per 100 ribu KH	101	104	47
Angka Kematian Bayi	per 1000 KH	9	8,99	4
Prevalensi balita gizi buruk	persen	0,11	0,10	0,1
Laju Pertumbuhan Penduduk	persen	< 1	1.03	< 1
Persentase peserta KB aktif	persen	90	87,72	95
Persentase PUS tak terlayani	persen	11,75	12,28	9
Persentase Keluarga Sejahtera	persen	76	76,05	81
Persentase PMKS yang terlayani	persen	30	16,27	80
Indeks Pembangunan Gender	angka	> 64	90,13	> 66
Persentase kekerasan anak yg tertangani	persen	100	100	100
Persentase desa memiliki perpustakaan	persen	28	28	84

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2016	CAPAIAN 2016	Target Akhir RPJMD 2016 - 2021
1	2	3	4	5
Jumlah gedung/ tempat gelar seni	unit	11	11	12
Intensitas pementasan seni budaya daerah	kali	65	92	76
Jumlah prestasi Olah Raga Tingkat regional dan Nasional	orang	3	18	12
Pertambahan nilai investasi baru	juta rupiah	270.000	480.000	770.000
Lama waktu perijinan investasi	Hari	5,6	5,6	4,2
Jumlah kunjungan wisata	Orang	1.850.000	1.689.179	2.979.000
Nilai PDRB Sektor Industri	triliun rupiah	4,2	3,6	5,9
Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	< 5	4,84	< 4
Rasio Tenaga Kerja dengan upah sesuai UMK	persen	80	89,85	95
Persentase koperasi sehat	persen	62	60	76
Jumlah usaha mikro bersertifikat / ijin	unit	293	313	1.193
Nilai PDRB Sektor Pertanian	triliun rupiah	5,2	5,09	6,9
Produksi padi	ton	252.189	226.707	269.053
Produksi jagung	ton	39.732	43.095	41.759
Produksi kedele	ton	223	134	235
Produksi daging	ton	14.490	9.856	15.229
Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan	miliar rupiah	295	105	360
Produksi Ikan Konsumsi	ton	4.969	5.001	5.400
Pasar yang memenuhi standar SNI	unit	0	0	3
Persentase calon transmigran dilatih	persen	100	100	100
Persentase jalan dalam kondisi baik	persen	75,77	77,56	82,15
Persentase jembatan dalam kondisi baik	persen	93,5	96,70	94,75
Persentase lajur jalan minimal 5,5 M	persen	10,04	11,45	25,5
Persentase drainase perkotaan	persen	21,41	20,54	25,16
Persentase bangunan pengairan dalam kondisi baik	persen	40,8	40,98	48,2
Ketersediaan air baku irigasi	persen	88,5	87,09	91
Persentase rumah tangga mengakses air bersih	persen	83,06	82,78	100
Persentase rumah Tangga terlayani sistem air limbah	persen	77,5	78,58	100
Rasio timbulan sampah terlayani	persen	59,7	60	61

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2016	CAPAIAN 2016	Target Akhir RPJMD 2016 - 2021
1	2	3	4	5
Persentase ruang terbuka hijau publik	persen	18,1	18,1	19,11
Luasan kawasan kumuh perkotaan	persen	26,9	23,70	0
Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	persen	5	- 4,7	5
Persentase SKPD yang menerapkan SIM dan memiliki website aktif	persen	28	65,96	43
Persentase desa dengan BUM Desa sehat	persen	60	78	100
Persentase tanah pemerintah daerah bersertifikat	persen	65	62,66	100
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	63,5	63,5	67

D. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang sudah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

95 s/d 100 : Sangat Berhasil

80 s/d <95 : Berhasil

50 s/d < 80 : Cukup Berhasil

0 s/d < 50 : Kurang Berhasil

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 36 (tiga puluh enam) sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2016 tersebut adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : *Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*

Hasil evaluasi pada sasaran strategis *Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* mendapatkan nilai rata-rata 103,47% dengan kategori sangat berhasil. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran *Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN 2015	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN %
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	77,6	78	77,96	99,95
Opini audit keuangan BPK	opini	WDP	WDP	-	-
Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	persen	86,78	87,5	90,63	106,98
Rata-rata Capaian Kinerja					103,47

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pada tahun 2016 pengukuran IKM dilaksanakan pada semua jenis layanan yang *diselenggarakan* 47 (empat puluh tujuh) unit pelayanan. Survei yang dilakukan menggunakan 2 metode, yaitu survei mandiri dan survei dengan pihak ketiga. Untuk mendapatkan hasil yang akurat ada beberapa unit pelayanan yang dipilih secara acak untuk diukur oleh pihak ketiga. Ada beberapa kendala yang dihadapi apabila pengukuran IKM dilaksanakan secara mandiri antara lain masih adanya rasa takut apabila masyarakat memberikan nilai yang kurang bagus.

2. Opini Audit Keuangan BPK

Opini laporan keuangan tahun 2016 masih dalam proses audit oleh auditor eksternal (BPK) sehingga belum dapat diketahui hasil capaiannya. Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2015 masih dinyatakan Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

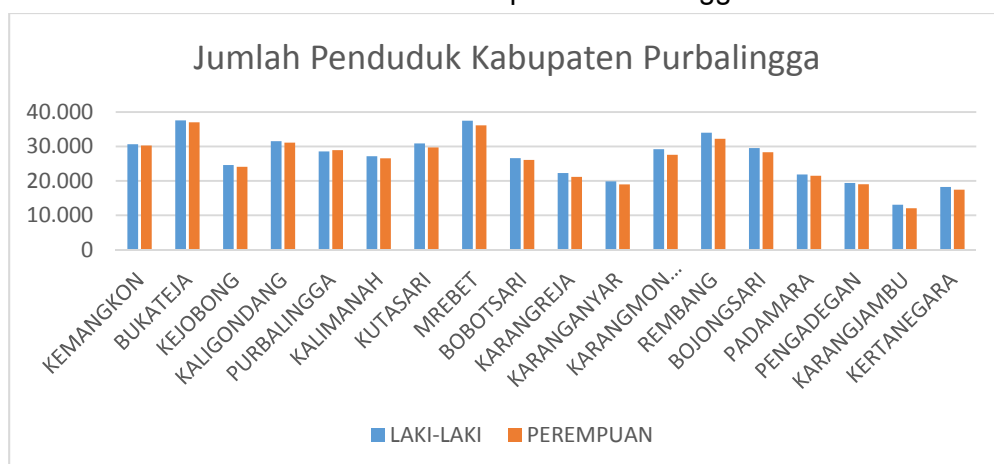
Hambatan yang dialami antara lain BPK dalam mengaudit keuangan memerlukan waktu yang cukup lama sehingga 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir belum dapat ditentukan hasil opini laporan keuangan.

3. Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/ Kota diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

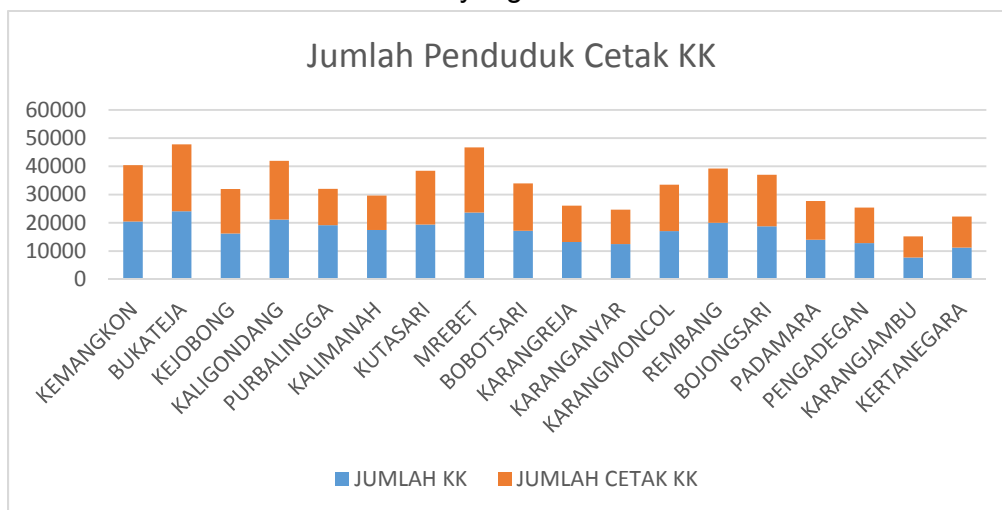
Jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga pada tahun 2016 sebanyak 950.462 jiwa terdiri atas 482.302 jiwa (50,74%) penduduk laki-laki dan 468.150 jiwa (49,26%) penduduk perempuan. Adapun sebaran penduduk terbesar di Kecamatan Bukateja dengan jumlah penduduk sebanyak 74.549 jiwa (7,92%) dan wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Karangjambu sebanyak 25.100 jiwa (2,50%) dari jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga.

Gambar 3.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Purbalingga



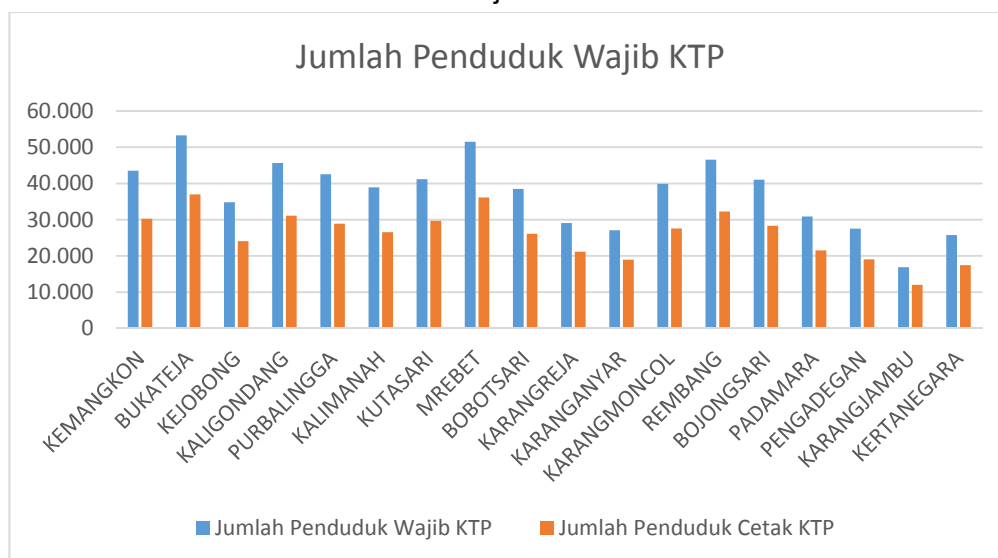
Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2016 sejumlah 306.078 KK. Terbagi di semua kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Adapun yang sudah mencetak Kartu Keluarga sebanyak 298.908 KK atau 97,66%. Sedangkan yang belum mencetak Kartu Keluarga sebanyak 8.396 KK atau 2,34%.

Gambar 3.3 Jumlah Penduduk yang Cetak KK



Penduduk yang wajib memiliki Kartu Tanda Pengenal (KTP) Kabupaten Purbalingga pada tahun 2016 sejumlah 657.694 jiwa. Terbagi di semua kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Adapun yang sudah melakukan perekaman data KTP sebanyak 647.592 jiwa atau 96,69%. Sedangkan yang belum sebanyak 23.062 jiwa atau 3,31%.

Gambar 3.4 Jumlah Penduduk Wajib KTP



Jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga sebanyak 950.452 jiwa. Sedangkan penduduk yang sudah membuat akta kelahiran sampai dengan tahun 2016 sejumlah 736.860 jiwa atau 77,53%. Itu terbagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori pembuatan akta kelahiran sebelum tahun 2009 yang belum menggunakan aplikasi SIAK dan setelah tahun 2009 yang sudah menggunakan aplikasi SIAK. Sedangkan yang belum membuat sebanyak 213.592 jiwa atau 22,47%.

Pelaksanaan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil pada tahun 2016 telah terpenuhi, namun masih ditemukan beberapa hambatan antara lain :

1. Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam tertib kepemilikan dokumen kependudukan.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang persyaratan pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Keterlambatan pencetakan KTP-el.
4. Kurang maksimalnya distribusi blangko KTP-el dari Pusat.
5. Kurang akuratnya data jumlah penduduk dari desa dan kecamatan.

Dalam rangka mengatasi hambatan tersebut melakukan upaya sebagai berikut :

- a) Melakukan pembinaan administrasi kependudukan dan penyuluhan akta catatan sipil melalui Kades/Lurah serta Ketua RT/Ketua RW.
- b) Melakukan sosialisasi administrasi kependudukan ke masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil melalui berbagai media : radio, leaflet, pamflet, buku saku, spanduk, pameran dan media sosial yang lain.
- c) Meningkatkan jumlah pelayanan administrasi kependudukan secara sistem jemput bola dengan menambah jumlah armada mobil keliling dan petugas pelayanan.

Sasaran 2 : Meningkatnya Ketaatan terhadap Perda dan Perbub

Hasil evaluasi pada sasaran strategis *Meningkatnya Ketaatan terhadap Perda dan Perbub* mendapatkan nilai rata-rata 100% dengan kategori sangat berhasil. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 *Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketaatan terhadap Perda dan Perbub*

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	EKSISTING 2015	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN %
Persentase pelanggaran Perda yang ditangani	Persen	100	100	100	100

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bertugas menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat sesuai dengan pasal 18 A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang telah diamandemen ke 4 dimana daerah memiliki hak desentralisasi atau hak otonom yaitu untuk mengatur daerahnya seperti keuangan dan kekayaan alamnya.

Berkenaan dengan kondisi pengelolaan mineral bukan batu bara yang kewenangannya diambil alih oleh provinsi menimbulkan permasalahan baru di mana rusaknya infrastruktur dan juga berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga tidak punya kewenangan untuk melakukan penindakan karena terhadap pelanggaran pengelolaan mineral bukan batu bara. Oleh karena itu perlu adanya sinergitas antara kabupaten/kota dan provinsi dalam menegakan Perundang-Undangan Daerah seperti sosialisasi, penyuluhan, serta intensitas penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah secara kontinyu.

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menekan angka pelanggaran Perda di Kabupaten Purbalingga, antara lain :

1. Razia Anak Sekolah

Tahun 2016 telah menjaring anak sekolah yang berada diluar pada saat jam sekolah sejumlah 61 (enam puluh satu) anak.

2. Razia Miras

Pada tahun 2016 razia miras menemukan sejumlah 3.054 botol dan 671 liter tuak dengan 15 (lima belas) orang penjual miras diamankan. Miras dan tuak sebagaimana tersebut diatas telah dimusnahkan oleh aparat yang berwenang dalam tahun 2016. Dari 15 (lima belas) orang penjual miras tersebut, 5 (lima) orang penjual telah diproses sampai dengan persidangan di Sidang di Pengadilan Negeri Purbalingga dan telah diputuskan bersalah, sedangkan 10 (sepuluh) orang penjual miras lainnya dilakukan pembinaan agar tidak berjualan miras kembali, akan tetapi apabila melanggar kembali akan diproses hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku.

3. Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar

Hambatan yang dihadapi dalam penegakan Perda antara lain :

- a. Kurangnya peran serta orang tua dalam mengawasi anak-anaknya pada saat jam sekolah.
- b. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi keberadaan penjual miras.
- c. Belum adanya rumah singgah bagi PGOT.

Untuk mengatasi hambatan tersebut langkah-langka yang telah dilakukan antara lain :

- a. Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- b. pembukaan lapangan kerja, pelatihan ketrampilan dan pendampingan bagi yang sudah mengikuti pelatihan serta memberikan modal usaha atau bahkan, pembuatan rumah singgah bagi pskotik jalanan sehingga apa bila ada keluarga yang mencari keluarga yang hilang mudah untuk menemukannya, disamping itu dengan adanya Perjanjian Kerjasama antara Jawa Barat Bagian Timur dan Jawa Tengah Bagian Barat bisa berjalan sesuai dengan yang diperjanjikan sehingga tidak ada lagi lempar-melempar berkenaan dengan psikotik jalanan.

Sasaran 3 : Menurunnya Indeks Risiko Bencana

Hasil evaluasi pada sasaran strategis *Menurunnya Indeks Risiko Bencana* mendapatkan nilai rata-rata 192,86% dengan kategori sangat berhasil. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 *Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Indeks Risiko Bencana*

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	EKSISTING 2015	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN %
Persentase korban bencana yang terlayani	Persen	100	100	100	100
Persentase bencana kebakaran yang terlayani	Persen	31	35	100	285,77
Rata-rata Capaian Kinerja					192,86

Bencana yang terjadi pada tahun 2016 sebanyak 151 kejadian. Jumlah tersebut dapat dibagi menjadi 2 macam bencana yaitu bencana kebakaran dan bencana karena alam. Bencana kebakaran yang terjadi pada tahun 2016 adalah 34 kejadian dan bencana alam sebanyak 116 kejadian.

Penanganan bahaya kebakaran di tahun 2016 yang dilaksanakan secara mandiri juga didukung peran aktif masyarakat pada tahun 2016 sebanyak 34 (tiga puluh empat) kejadian yang tertangani.

Jangkauan pelayanan damkar untuk Kabupaten Purbalingga belum merata di setiap wilayah khususnya terkait dengan jarak tempuh dari pos damkar ke lokasi kebakaran. Hal ini disebabkan baru dibangun 2 pos damkar yakni pos damkar di Kota Purbalingga dan pos damkar Kecamatan Bobotsari. Pos damkar Kota Purbalingga dibagian selatan wilayah Kabupaten Purbalingga dan pos damkar Kecamatan Bobotsari di wilayah utara Kabupaten Purbalingga, sedangkan di wilayah timur belum ada pos damkar yang beroperasi. Hal ini mengakibatkan penanganan kejadian kebakaran untuk wilayah timur jarak tempuhnya relatif jauh dibandingkan dengan wilayah utara dan selatan

Adapun kendala yang dihadapi khususnya bagi petugas pemadam kebakaran antara lain :

1. Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas
2. Lokasi kebakaran berada di jalan yang sempit
3. Sumber air yang jauh dan terbatas

4. Jangkauan pelayanan pemadam kebakaran di Kabupaten Purbalingga hanya 2 (dua) Pos yakni Pos Induk (Purbalingga) dan Pos Damkar yang ada di Kecamatan Bobotsari yang merupakan wilayah utara sedangkan wilayah timur belum ada.

Sedangkan dari Sarana pendukung kerja yang ada sekarang meliputi :

1. Kendaraan Damkar 5 (lima) Unit
2. 4 (empat) Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
3. Slang Air 20 (dua puluh) buah;
4. Helm safety 8 (delapan) buah;

Solusi mengatasi kendala tersebut diharapkan adanya dukungan personil pemadam kebakaran untuk mengisi 3 (tiga) Pos Damkar (Purbalingga, Bobotsari dan Rembang) di Tahun 2017 diharapkan adanya dukungan penambahan personil serta alat kerja guna mendukung operasional dilapangan dalam rangka mendukung pelayanan publik semakin optimal apabila terjadi bencana kebakaran, seperti mesin penyedot air, slang, senter kepala, kaca mata safety, helem safety, selang air, gansel, sarung tangan, rompi, handy talky (HT), tali pengaman, megapon, briket, tabung APAR, genset, asuransi bagi petugas damkar, komputer dan printer untuk laporan di setiap pos, rak untuk menyimpan alat damkar, verbed, kursi dan meja, jaringan PDAM, adanya penambahan jaringan hidran air guna memudahkan mobil damkar untuk mengisi air serta guna mempermudah jangkauan dalam pengisian apabila ada kejadian bencana kebakaran, adanya pelatihan dan sosialisasi penanganan bahaya kebakaran ke Dinas/ Intansi/ Perusahaan/ Rumah Sakit/ Masyarakat.

Sasaran 4 : *Meningkatnya Paham dan Wawasan Kebangsaan*

Hasil evaluasi pada sasaran strategis *Meningkatnya Paham dan Wawasan Kebangsaan* tidak ada realisasinya. Di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2016 tidak menyelenggarakan pemilu. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5 *Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Paham dan Wawasan Kebangsaan*

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	EKSISTING 2015	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN %
Partisipasi masyarakat dalam Pemilu	Persen	60	-	-	-

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan dihitung berdasarkan rata-rata angka partisipasi pemilihan legislatif, pemilihan presiden, pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan bupati dan wakil bupati sepanjang tahun 2016. Partisipasi dalam pemilu pada tahun 2016 tidak ada capaiannya, dikarenakan tidak adanya pesta demokrasi baik pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah baik gubernur/wakil gubernur maupun bupati/wakil bupati yang diikuti oleh masyarakat Kabupaten Purbalingga.

Sasaran 5 : *Meningkatnya Status Ketahanan Pangan*

Hasil evaluasi pada sasaran strategis *Meningkatnya Status Ketahanan Pangan* mendapatkan nilai rata-rata 93,53% dengan kategori berhasil. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6 *Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Status Ketahanan Pangan*

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	EKSISTING 2015	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN %
Skor Pola Pangan Harapan	Skor	84	87	82,5	94,82
Ketersediaan Pangan Utama	Kg/kap/th	163	165	152,19	92,24
Rata-rata Capaian Kinerja					93,53

Secara umum ketahanan pangan Kabupaten Purbalingga cukup baik dari sistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan. Pada sistem ketersediaan pangan, berdasarkan hasil analisa Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 produksi komoditas pangan utama menunjukkan surplus apabila dibandingkan dengan konsumsi penduduknya. Untuk komoditas beras

mengalami surplus sebanyak 74.008 ton. Namun demikian terdapat beberapa komoditas yang produksinya lebih sedikit dibandingkan dengan konsumsinya.

Tabel 3.7 Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Purbalingga Tahun 2015.

No	Komoditas	Produksi (Ton)	Konsumsi (Ton)	Surplus / Minus (Ton)
1	Beras	143.570	69.562	74.008
2	Jagung	39.339	2.908	36.431
3	Ubi Jalar	3.604	1.769	1.835
4	Ubi Kayu	74.159	5.821	68.338
5	Daging	1.032	731	301
6	Telur	7.807	5.929	1.878
7	Gandum/Terigu	0	2.732	-2.732
8	Susu	270	6.567	-6.297
9	Minyak Sawit	0	11.273	-11.273

Ketersediaan energi bersumber bahan pangan pada tahun 2015 berjumlah 2.978 kkal/kapita/hari. Angka tersebut melebihi dari angka ketersediaan normatif yaitu 2.200 kkal/kapita/hari atau mencapai 135,36 %.

Dari sisi cadangan pangan masyarakat, berdasarkan hasil pendataan lumbung pangan di Kabupaten Purbalingga jumlahnya masih banyak, Lumbung yang masih aktif, berkembang dan dikelola oleh masyarakat berjumlah 144 unit pada 75 desa/kelurahan. Lumbung pangan masyarakat tersebut berupa lumbung desa, lumbung kelompok tani, lumbung RT, lumbung RW, lumbung dusun dan lumbung mardilayon. Secara umum pengelolaannya bersifat sederhana dan bersifat sosial untuk simpan pinjam gabah, dengan aset rata-rata setiap lumbung berkisar 5 ton gabah.

Pada sistem distribusi pangan, secara umum distribusi pangan berjalan lancar. Demikian juga dari akses dan harga pangan relatif stabil. Hanya beberapa bahan pangan yang mengalami kenaikan pada saat-saat tertentu dan bahan pangan yang masih mengalami ketergantungan pada impor dari luar negeri.

Pada sistem konsumsi pangan, langkah yang telah ditempuh adalah peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan. Hal tersebut dapat diukur dari skor Pola Pangan Harapan (PPH), yang menunjukkan keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat. Hasil survei konsumsi pangan Kabupaten Purbalingga yang dilaksanakan pada pertengahan tahun 2015, skor PPH adalah 82,5, sebagaimana tabel 3.8. Angka tersebut menunjukkan bahwa pola

keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat tergolong relatif cukup baik, walaupun belum mencapai angka yang ideal yaitu 100. Konsumsi pangan yang masih kurang diantaranya bersumber dari kelompok pangan hewani, sayur dan buah-buahan.

Tabel 3.8 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Purbalingga Tahun 2015

No	Kelompok Pangan	Kalori	% AKE	Skor PPH	Skor PPH Maksimum
1.	Padi-padian	998,5	46,4	23,2	25,0
2.	Umbi-umbian	47,6	2,2	1,1	2,5
3.	Pangan Hewani	126,2	5,9	11,17	24,0
4.	Minyak dan Lemak	269,1	12,5	5,0	5,0
5.	Buah/Biji Berminyak	22,8	1,1	0,5	1,0
6.	Kacang-kacangan	129,9	6,0	10,0	10,0
7.	Gula	101,2	4,7	2,4	2,5
8.	Sayur dan Buah	122,7	5,7	28,5	30,0
9.	Lain-lain	31,9	1,5	0,0	0,0
	Total	1.849,9	86,0	82,5	100

Sasaran 6 : *Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni*

Hasil evaluasi pada sasaran strategis *Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni* mendapatkan nilai rata-rata 98,04% dengan kategori sangat berhasil. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9 *Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni*

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	EKSISTING 2015	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN %
Persentase rumah layak huni	persen	88,6	89,4	88,58	99,08
Persentase kepemilikan rumah	persen	80,12	81,62	80,15	98,19
Rata-rata Capaian Kinerja					98,64

Jumlah rumah tangga yang ada di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2016 sebanyak 301.062 KK, yang terbagi menjadi dua kategori. Kategori yang sudah mempunyai rumah sebanyak 241.295 KK dan yang belum mempunyai rumah sebanyak 59.767 KK.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Purbalingga memperoleh Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) yang merupakan program Kemenpera untuk mendorong Pemda dalam memfasilitasi penyelenggaraan perumahan swadaya serta membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar dapat menempati rumah dan lingkungan yang layak huni. Disamping bantuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga mengeluarkan kebijakan di sektor perumahan dan permukiman yaitu program pengembangan dan peningkatan kualitas perumahan dengan Kegiatan Fasilitasi Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni sejumlah 2.150 rumah, dana bantuan gubernur sejumlah 120 rumah, dana CSR sejumlah 30 rumah dan partisipasi masyarakat sejumlah 14 rumah.

Sasaran 7 : *Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat*

Hasil evaluasi pada sasaran strategis *Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat* mendapatkan nilai rata-rata 99,80% dengan kategori sangat berhasil. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10 *Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat*

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	EKSISTING 2015	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN %
Harapan lama sekolah	Angka	11,78	11,9	11,78	98,9
Rata-rata lama sekolah	Tahun	6,85	6,96	6,85	98,4
APK SD/Sederajat	Angka	109	109	110,34	101,2
APK SMP/Sederajat	Angka	100	100	100,36	100,3
APM SD/Sederajat	Angka	91	92	92,61	100,6
APM SMP/ Sederajat	Angka	69	70	69,40	99,1
Rata-rata Capaian Kinerja					99,80

1. Rata-rata Lama sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun keatas di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah atau sedang dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang ditempuh.

Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, misalnya tamat SD adalah 6 tahun, tamat SMP 9 tahun dan seterusnya.

Perhitungan lama sekolah dilakukan tanpa memperhatikan apakah seseorang menamatkan sekolah lebih dari waktu yang telah ditentukan. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2016 baru mencapai 6,85 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pendidikan penduduk usia 15 tahun baru mencapai kelas 1 SMP.

2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Sederajat

Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat tingkat partisipasi sekolah penduduk adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). Angka ini dihitung berdasarkan jumlah siswa yang sekolah pada tingkat/jenjang pendidikan SD/ sederajat, tanpa melihat usia siswa dibagi dengan penduduk kelompok usia 7-12 tahun dikalikan 100%

APK SD/ sederajat mengalami kenaikan dari 109 % pada tahun 2015, tahun 2016 naik menjadi 110, 34%. APK SD/ sederajat diatas 100 % artinya jumlah penduduk yang sedang bersekolah ditingkat SD/ sederajat lebih besar dibandingkan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun. Hal ini disebabkan karena anak usia diatas 12 tahun tetapi saat ini masih bersekolah ditingkat SD/ sederajat dikarenakan harus tinggal kelas (tidak naik) atau terlambat sekolah. Selain itu juga ada siswa yang usianya kurang dari 7 tahun sudah bersekolah di jenjang SD/ sederajat atau lebih muda dibawah standar usia jenjang SD/ sederajat yaitu usia 7-12 tahun.

3. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Sederajat

Ukuran lain yang dapat digunakan untuk melihat tingkat partisipasi sekolah penduduk adalah Angka Partisipasi Murni (APM). APM menunjukkan jenjang anak sekolah disuatu kelompok usianya atau usia anak sesuai dengan kelompok usia pada jenjang SD/ sederajat. Angka ini dihitung dengan perbandingan jumlah siswa usia 7-12 tahun dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun pada jenjang SD/ sederajat.

APM Kabupaten Purbalingga pada tahun 2015 sebesar 91,00% dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 92,61%.

4. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ sederajat :

APK ini dihitung berdasarkan perbandingan antara anak yang sekolah pada tingkat/jenjang pendidikan tertentu dibagi dengan penduduk dikalikan 100% APK Kabupaten Purbalingga pada tahun 2015 sebesar 100% dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 100,36%. APK diatas 100% artinya jumlah penduduk yang sedang bersekolah ditingkat SD/ sederajat lebih besar dibandingkan jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun. Hal ini disebabkan adanya siswa yang berumur diatas 15 tahun tetapi saat ini masih bersekolah ditingkat SMP/ sederajat dikarenakan harus tinggal kelas (tidak naik) atau terlambat sekolah. Selain itu juga ada siswa yang usianya kurang dari 13 tahun sudah bersekolah di jenjang SMP/ sederajat atau lebih muda dibawah standar usia jenjang SMP/ sederajat yaitu usia 13-15 tahun.

5. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ Sederajat :

APM ini dihitung berdasarkan jumlah siswa usia 13-15 tahun yang sekolah pada tingkat/jenjang pendidikan SMP/ sederajat dibagi dengan jumlah penduduk penduduk kelompok usia 13-15 tahun dikalikan 100%.

APM pada tahun 2015 sebesar 69,30 % dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 69,40%. APM ini hanya menghitung jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah ditingkat SMP/ sederajat, tetapi diluar jenjang usia 13-15 tahun, siswa yang bersekolah tidak dihitung, yaitu siswa yang usianya kurang dari 13 tahun dan lebih dari 15 tahun yang duduk di jenjang SMP/ sederajat

Permasalahan dalam urusan pendidikan secara umum :

1. Banyaknya penduduk usia kurang dari 15 tahun yang lebih memilih bekerja di sektor non formal dikarenakan angka kemiskinan yang masih tinggi, belum sadarnya warga akan pentingnya pendidikan yang lebih tinggi.
2. Tingkat ekonomi masyarakat, setelah banyaknya pabrik-pabrik rambut berdiri di Purbalingga hingga ke desa-desa (plasma) dan membuka peluang kerja bagi anak usia sekolah untuk bekerja. Hal ini menjadikan banyak masyarakat atau orang tua yang hanya menyekolahkan anaknya hanya sampai jenjang SD/ Sederajat atau SMP/ Sederajat saja. Kemudian anak-anak tersebut sudah diharuskan bekerja untuk meringankan beban orang tua.
3. Minat yang kurang pada anak untuk bersekolah, sehingga mereka lebih memilih untuk keluar dari bangku sekolah. Hal ini disebabkan banyak faktor

antara lain pergaulan yang kurang baik, ada juga anak yang merasa tidak mampu (tidak pintar), tidak naik kelas sehingga mereka minder untuk melanjutkan sekolah.

Cara mengatasi permasalahan tersebut adalah :

1. Dengan adanya program Wajib Belajar 9 tahun, diharapkan agar anak usia 7-15 tahun untuk bersekolah mencapai jenjang SMP/ sederajat.
2. Pendekatan terhadap orang tua dan anak untuk menyadarkan mereka pentingnya sekolah minimal hingga jenjang Sekolah Menengah (SM) untuk masa depan yang lebih baik, dalam hal ini pemerintah memfasilitasi dengan memberikan bantuan, antara lain melalui dana BOS dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
3. Untuk mengurangi kenakalan atau pergaulan yang kurang baik, pihak sekolah menerapkan AKPS (Angka Kredit Pelanggaran Siswa) secara arif, bijaksana dan tegas, yang bertujuan membentuk siswa bisa disiplin, berahlak baik dan berprestasi serta dukungan orang tua terhadap penerapan AKPS oleh sekolah.

Program yang mendukung untuk untuk mencapai Sasaran Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat antara lain :

- a. Program Pendidikan Usia Dini;
- b. Program Pendidikan Dasar;
- c. Program Pendidikan Menengah;
- d. Program Pendidikan Non Formal;
- e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Sasaran : 8 *Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat*

Hasil evaluasi pada sasaran strategis *Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat* mendapatkan nilai rata-rata 101,59% dengan kategori sangat berhasil. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11 *Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat*

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	EKSISTING 2015	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN %
Usia Harapan Hidup	Tahun	72,8	72,9	72,29	99,16
Angka Kematian Ibu	Per 100 ribu KH	136	101	104	97,1
Angka Kematian Bayi	Per 1000 KH	10	9	8,99	100,10
Prevalensi balita gizi buruk	persen	0,11	0,11	0,10	110
Rata-rata Capaian Kinerja					101,59

1. Usia Harapan Hidup

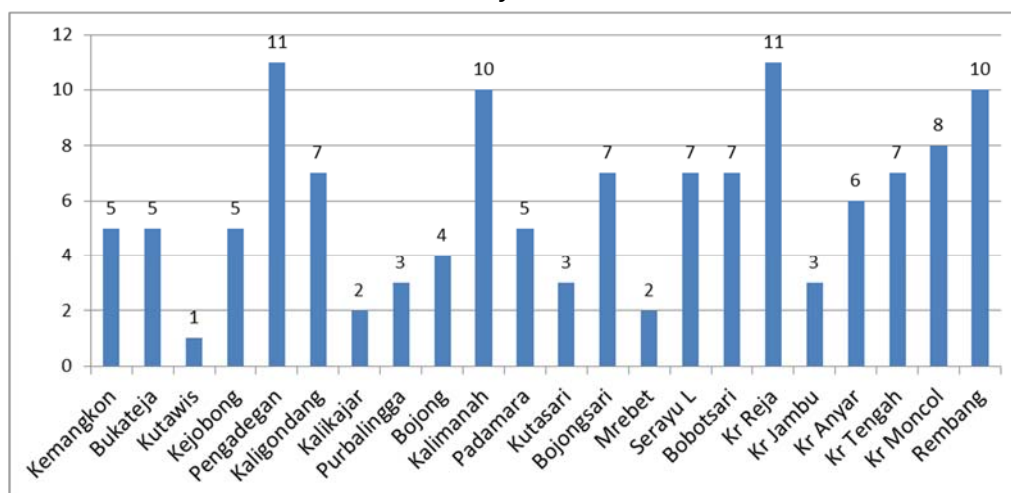
Usia harapan hidup di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2016 sebesar 72,29 tahun dari target sebesar 72,9 tahun dengan capaian 99,16%. Usia harapan hidup merupakan dimensi umur panjang dan sehat yang dipengaruhi oleh angka lahir anak hidup dan anak masih hidup. Faktor yang mempengaruhi pencapaian ini antara lain adanya peningkatan perawatan kesehatan melalui Puskesmas, peningkatan daya beli masyarakat yang akan meningkatkan akses pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh penghasilan yang memadai dan pada akhirnya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta memperpanjang usia harapan hidup.

Permasalahan utama yang dihadapi adalah masih kurangnya kesadaran akan hidup sehat. Upaya pemecahan masalah yang dilakukan pemerintah antara lain mencukupi sarana prasarana kesehatan, penyuluhan dan promosi kesehatan serta mengadakan puskesmas keliling ke desa-desa terpencil.

2. Angka Kematian Bayi (AKB)

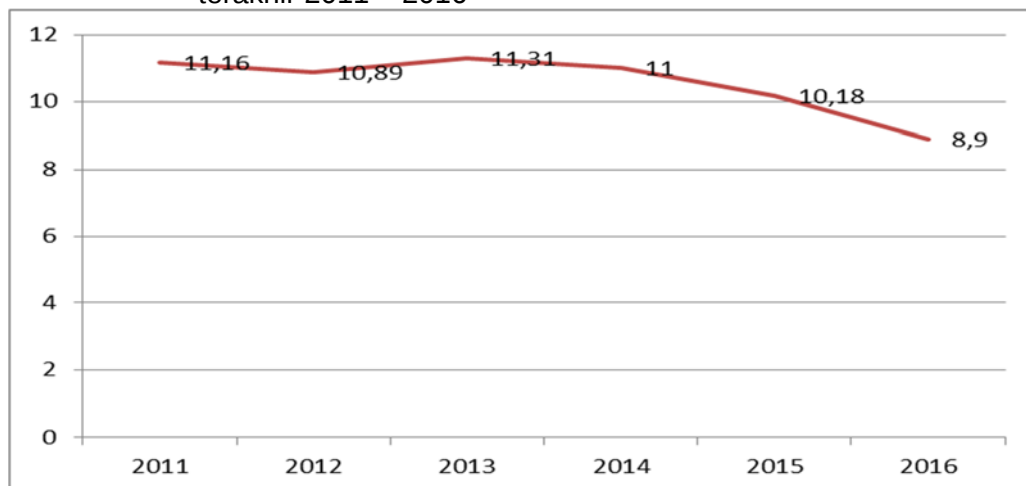
AKB Kabupaten Purbalingga tahun 2016 sebanyak 129 kasus atau 8,9 per 1.000 kelahiran hidup dan dibanding dengan tahun 2015 AKB mengalami penurunan dari 150 kasus atau 10,18 per 1.000 kelahiran hidup. Jumlah kematian bayi tertinggi terdapat di wilayah Puskesmas Pengadegan dan Karangreja yaitu sebanyak 11 kasus, sedangkan terendah adalah Puskesmas Kutawis yaitu 1 Kasus.

Gambar 3.5 Jumlah Kematian Bayi menurut data Puskesmas Tahun 2016



Ada banyak faktor yang mempengaruhi tingkat AKB tetapi tidak mudah untuk menemukan faktor yang paling dominan. Tersedianya berbagai fasilitas atau faktor akseptabilitas dan pelayanan kesehatan dengan tenaga medis yang terampil, serta kesediaan masyarakat untuk merubah pola kehidupan tradisional yang bertentangan dengan kesehatan. Kehidupan modern dalam bidang kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap tingkat AKB. Tren angka kematian bayi dalam 5 tahun terakhir cenderung menurun.

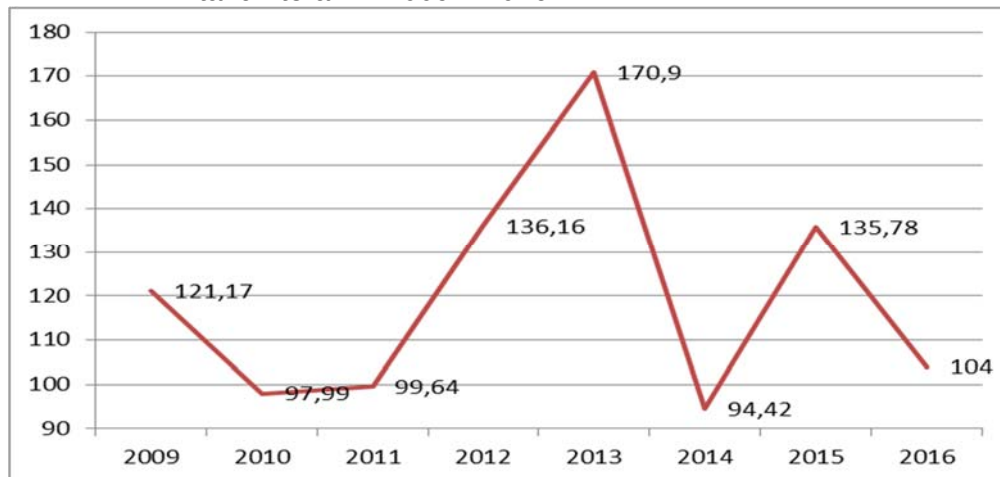
Gambar 3.6 Tren angka kematian bayi Kabupaten Purbalingga dalam 6 tahun terakhir 2011 – 2016



3. Angka Kematian Ibu Maternal (AKI)

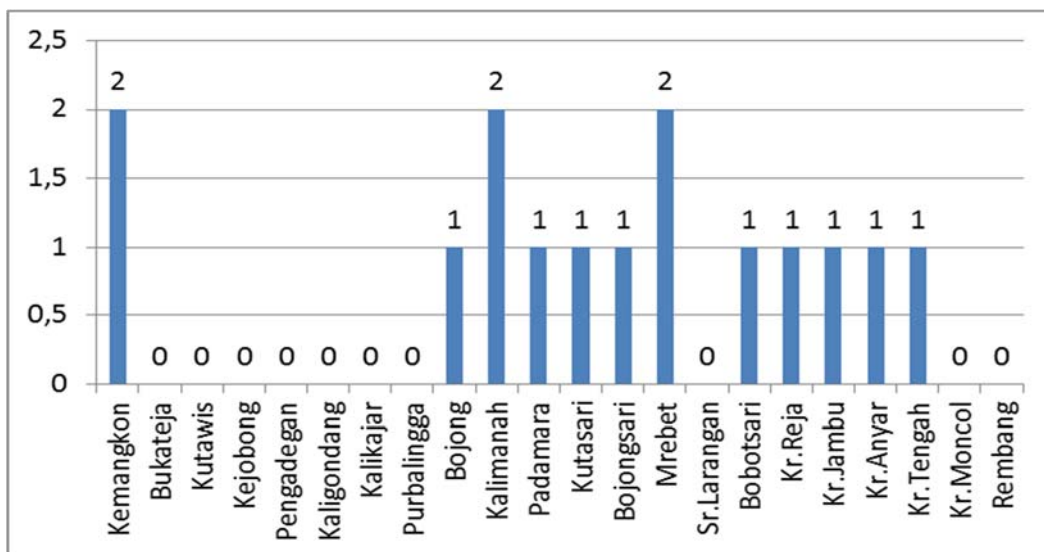
Angka Kematian ibu di Kabupaten Purbalingga tahun 2016 sebesar 15 kasus atau 104,6 per 100.000 kelahiran hidup. Dibanding dengan tahun 2015 sebesar 20 kasus atau 135,78 per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu tahun 2016 mengalami penurunan cukup signifikan.

Gambar 3.7 Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Purbalingga dalam 8 tahun terakhir 2009 – 2016



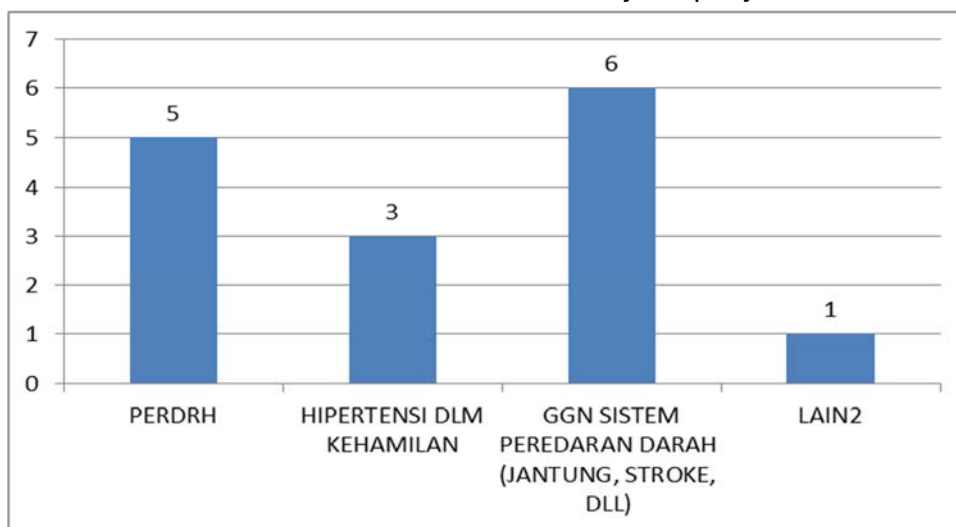
Persebaran kasus kematian ibu berdasar Puskesmas yaitu sebagai berikut :

Gambar 3.8 Jumlah Kematian Ibu menurut data Puskesmas Kabupaten Purbalingga Tahun 2016



Kasus kematian ibu tertinggi terdapat di wilayah Puskesmas Kemangkon, Kalimanah dan Mrebet masing-masing 2 kasus disusul Puskesmas Bojong, Padamara, Kutasari, Bojongsari, Bobotsari, Karangjambu, Karanganyar, Karangreja dan Karangtengah masing-masing 1 kasus. Sedangkan berdasarkan penyebabnya kematian karena perdarahan 5 kasus, Hipertensi dalam kehamilan 3 kasus, Gangguan sistem peredaran darah 6 kasus dan penyebab lainnya 1 kasus.

Gambar 3.9 Jumlah Kematian Ibu menurut jenis penyakit



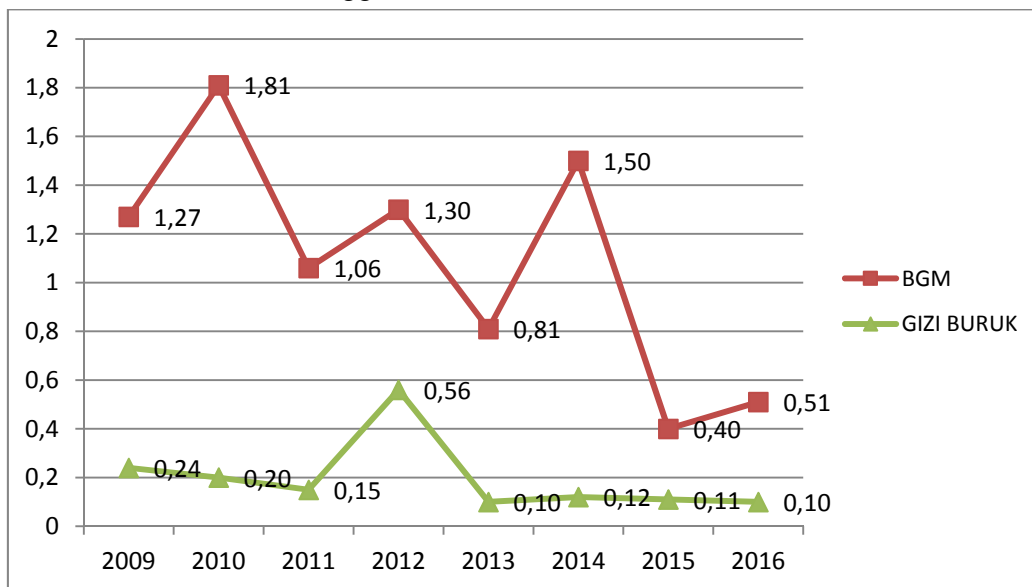
4. Status Gizi Balita

Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara penilaian status gizi balita adalah dengan pengukuran antropometri yang menggunakan indeks Berat Badan dan Tinggi Badan (BB/TB).

Perkembangan keadaan gizi masyarakat yang dapat dipantau berdasarkan hasil pencatatan dan pelaporan program Perbaikan gizi masyarakat yang tercermin dalam hasil penimbangan balita setiap bulan di Posyandu. Pada tahun 2016 terdapat 58 kasus gizi buruk dan Balita di bawah Garis Merah (BGM) sebanyak 298 kasus (0,51 %) dan semuanya telah mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Untuk menyelamatkan bangsa dari ancaman "*loss generation*" akibat terjadinya "*Booming*" balita gizi buruk, upaya yang dilakukan pemerintah melalui program perbaikan gizi masyarakat berupa kegiatan pelacakan balita gizi buruk, rujukan dan perawatan balita gizi buruk, pemberian Paket Makanan Tambahan (PMT) pemulihan kepada balita gizi buruk dan gizi kurang dari keluarga miskin serta didukung oleh peningkatan penyuluhan gizi dan pemberdayaan Posyandu.

Gambar 3.10 Tren BGM (BB/U) dan Gizi Buruk (BB/TB) Kabupaten Purbalingga Tahun 2009-2016



Untuk wilayah bebas rawan gizi adalah prevalensi gizi kurang dan gizi buruk pada balita <15,00% pada kurun waktu tertentu. Kabupaten Purbalingga Pada tahun 2016 mempunyai prevalansi gizi kurang dan gizi buruk dibawah 15,00% sehingga seluruh wilayah bebas rawan gizi.

Untuk mencapai Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat program yang dilaksanakan adalah :

- a. Program Pengelolaan Obat Publik, Makanan, Minuman dan Perbekalan Farmasi
- b. Program Pelayanan KIA, Remaja, dan Usia Lanjut
- c. Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan
- d. Program PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- e. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
- f. Program Kesehatan Matra
- g. Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Pelayanan Kesehatan
- h. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- i. Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan
- j. Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
- k. Program Peningkatan Pelayanan pada BLUD
- l. Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana Pemerintahan

Sasaran 9 : Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk

Hasil evaluasi pada sasaran strategis *Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk* mendapatkan nilai rata-rata 96,74% dengan kategori sangat berhasil. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12 *Capaian Kinerja Sasaran Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk*

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	EKSISTING 2015	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN %
Laju Pertumbuhan Penduduk	persen	1,06	< 1	1,03	97,08
Persentase peserta KB aktif	Persen	88	90	87,72	97,46
Persentase PUS tak terlayani	Persen	11,9	11,75	12,28	95,68
Rata-rata Capaian Kinerja					96,74%

1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Salah satu dampak pelaksanaan program KB adalah terkendalnya laju pertumbuhan penduduk. Pada tahun 2015 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Purbalingga mengalami penurunan sebesar 0,3 pada tahun 2015 sebesar 1,06 menjadi 1,03 pada tahun 2016. Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk juga diikuti dengan terkendalnya tingkat kelahiran, *Total Fertility Rate* (TFR).

Tabel 3.13 *Capaian Indikator LPP dan TFR*

Indikator Kinerja	2012	2013	2014	2015	2016
LPP	0,80	0,67	0,32	1,06	1,03
TFR	2,10	2,10	1,94	2,10	2,08

Sumber data : BKBPP dan BPS

Pada tahun 2015 TFR sebesar 2,10 sedangkan tahun 2016 TFR sebesar 2,08 mengalami penurunan sebesar 0,02 atau 0,96%. Data tersebut menyatakan bahwa laju peningkatan LPP dipengaruhi oleh laju peningkatan TFR. LPP juga dipengaruhi oleh faktor mobilitas penduduk yaitu penduduk datang, pergi dan mati di suatu wilayah/daerah, dengan asumsi bahwa tingkat harapan hidup

akan mengalami kenaikan, sedangkan penduduk datang dan pergi seimbang maka pengendalian tingkat kelahiran melalui pelaksanaan program KB akan berpengaruh terhadap pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Pemerintah Kabupaten Purbalingga berharap tercapainya penduduk tumbuh seimbang pada tahun 2016 akan terwujud sehingga akan mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat.

2. Persentase Peserta KB Aktif dan PUS tak Terlayani

Keberhasilan program KB di Kabupaten Purbalingga sebagian besar merupakan kontribusi wanita, sedangkan partisipasi pria masih rendah. Hal itu disebabkan karena :

- a. Adanya anggapan masyarakat bahwa kesertaan KB ada di pihak perempuan.
- b. Belum diterimanya Metode Operasi Pria (MOP) oleh sebagian masyarakat
- c. Pasangan Usia Subur pengguna kontrasepsi masih didominasi oleh kontrasepsi yang bersifat hormonal, khususnya suntik dan pil.

Untuk meningkatkan peran serta pria dalam kesertaan KB hal yang perlu dilakukan antara lain :

- a. Meningkatkan kualitas dan frekuensi penyuluhan.
- b. Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) inter personal dan intra personal.
- c. Pendekatan pada masyarakat.
- d. Penyediaan sarana pelayanan MOP.

Pencapaian peserta KB aktif tahun 2016 mencapai 172.731 akseptor dari Pasangan Usia Subur 196.908 orang, sehingga yang tidak terlayani adalah 24.177 orang. Pencapaian partisipasi pria dalam KB tahun 2016, untuk peserta KB baru sebesar 2.735 akseptor atau 10,62% dari total pencapaian peserta KB baru, dengan rincian pemakaian kontrasepsi kondom mencapai 2.706 akseptor dan MOP mencapai 29 akseptor, sedangkan untuk peserta KB aktifnya mencapai 6.635 peserta, atau sekitar 0,43% dari total peserta KB Aktif yang terdiri dari MOP sebanyak 1.952 akseptor dan kondom sebanyak 4.676 akseptor.

Tabel 3.14 Pencapaian Peserta KB Aktif Tahun 2016

No.	Metode	PPM	Realisasi	%Thd PPM	% Thd Total PA
1	IUD	6.308	13.313	211,05	8,97
2	MOP	1.363	1.952	143,73	1,32
3	MOW	12.760	10.868	85,17	7,32
4	Implan	14.367	19.052	132,61	12,83
5	Suntikan	63.124	78.927	125,03	53,17
6	Pil	20.103	19.661	97,8	13,24
7	Kondom	6.034	4.676	77,49	3,15
	Jumlah	124.059	148.456	119,67	100

Sasaran 10 : *Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga*

Hasil evaluasi pada sasaran strategis *Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk* mendapatkan nilai rata-rata 100% dengan kategori sangat berhasil. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15 *Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga*

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	EKSISTING 2015	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN %
Persentase Keluarga Sejahtera	Persen	75,1	76	76,05	100

Jumlah Keluarga pra sejahtera pada tahun 2016 sebanyak 70.439 KK atau 24,10%. Untuk menurunkan jumlah keluarga pra sejahtera dilaksanakan kegiatan KIE dan Advokasi, penyuluhan yang dilakukan semua pihak terutama tokoh masyarakat baik formal maupun non formal, kader institusi masyarakat pedesaan/kader KB serta pembinaan dan pelayanan pada keluarga pra sejahtera untuk meningkatkan tahapan kesejahteraannya sebagian besar kegagalan keluarga pra sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraannya adalah tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar/primer pada variabel sebagian besar luas lantai rumah masih dari tanah.

Beberapa upaya untuk mengentaskan keluarga pra sejahtera menuju tahapan sejahtera yang lebih baik dilakukan antara lain : peningkatan pendapatan melalui keikutsertaan anggota keluarga dalam kelompok UPPKS, mendapatkan

pelayanan KB gratis dan diutamakan pemasangan kontrasepsi MKJP, terbentuknya kelompok gotong royong dan arisan material pembangunan rumah, disamping bantuan baik dari pemerintah maupun dari anggota masyarakat lainnya. Jumlah keluarga sejahtera I pada tahun 2016 62.790 sebesar keluarga. Sebagian besar kenaikan jumlah keluarga sejahtera I disebabkan karena peningkatan tahapan dari keluarga pra sejahtera yang mampu memenuhi kebutuhan dasar/primer. Kegagalan keluarga sejahtera I untuk meningkatkan tahapan KS nya disebabkan keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan sekunder, terutama menyediakan gizi keluarga sekali dalam seminggu serta gagal memenuhi kebutuhan rekreasi serta gagal memenuhi kebutuhan sosial yaitu upaya makan bersama, serta menjadi pengurus pada kegiatan kegiatan sosial.

Keluarga sejahtera yang diukur melalui keluarga sejahtera III dan III+ selama empat tahun terakhir mengalami peningkatan.

Kendala yang dihadapi :

- a. Kualitas Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) tidak meningkat bahkan mengalami penurunan disebabkan karena krisis multi dimensi yang berkepanjangan, sehingga kader tidak memiliki waktu luang untuk kegiatan sosial.
- b. Kesulitan memasarkan hasil produk Kelompok UPPKS dikarenakan kualitas produk yang masih relatif rendah dari kemasan yang kurang menarik.
- c. Kurangnya modal usaha Kelompok UPPKS untuk mengembangkan usahanya.
- d. Kesulitan rekrutmen kader yang mempunyai kemampuan dan kemauan dalam menangani Bina Keluarga Sejahtera (BKS).
- e. Pemahaman keluarga terhadap manfaat kegiatan BKS masih rendah, demikian juga dukungan tokoh masyarakat masih kurang.
- f. Kurangnya sarana untuk meningkatkan KIE, antara lain brosur, Leaflet dan sarana pemutaran film berupa layar lebar.
- g. Biaya operasional pendataan keluarga bagi kader pendata masih sangat kecil hal ini sangat berpengaruh terhadap kinerja dan kualitas data yang di hasilkan.

Upaya untuk menyelesaikan masalan tersebut adalah :

- a. Rekrutmen kader Bina Keluarga Sejahtera dan UPPKS melalui kerjasama kemitraan dengan PKK, PGRI , Patayat NU, A'isyah dan mengintegrasikan kegiatan BKS dengan lembaga Posyandu dan Pos PAUD

- b. Meningkatkan penyuluhan, pembinaan dan pelatihan bagi kader Bina Keluarga Sejahtera melalui kerjasama dengan PKK, PGRI dan pendekatan pada tokoh masyarakat.
- c. Meningkatkan operasional Mobil Penerangan KB, KIE KB melalui media massa/ radio, penyediaan sarana/ media KIE melalui kerjasama dengan lembaga pemerintah ataupun swasta.
- d. Melaksanakan advokasi program KB kepada pemerintah daerah maupun pusat untuk meyakinkan pentingnya penyediaan data keluarga dan kependudukan yang berkualitas

Sasaran 11 : *Meningkatnya Pelayanan Terhadap PMKS dan Kelompok Masyarakat Rentan Lainnya*

Hasil evaluasi pada sasaran strategis *Meningkatnya Pelayanan Terhadap PMKS dan Kelompok Masyarakat Rentan Lainnya* mendapatkan nilai rata-rata 54,23% dengan kategori cukup berhasil. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16 *Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Pelayanan Terhadap PMKS dan Kelompok Masyarakat Rentan Lainnya*

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	EKSISTING 2015	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN %
Persentase PMKS yang terlayani	Persen	24	30	16,27	54,23

Realisasi capaian indikator kinerja Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani di Kabupaten Purbalingga adalah sebanyak 31.594 orang dari 194.104 orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Adanya dukungan bantuan dari APBN kepada keluarga miskin (keluarga penerima manfaat) KPM melalui bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang sasarannya 23.039 KPM dan dari Provinsi 350 sasaran serta dari Pemerintah Kabupaten sebanyak 5.555 KPM.

Sasaran 12 : Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Hasil evaluasi pada sasaran strategis *Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak* mendapatkan nilai rata-rata 120,41% dengan kategori sangat berhasil. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.17 *Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	EKSISTING 2015	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN %
Indeks Pembangunan Gender	Angka	63,43	> 64	90,13	140,83
Persentase kekerasan anak yg tertangani	Persen	100	100	100	100
Rata – rata Capaian Kinerja					120,41

1. Indek Pembangunan Gender (IPG)

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut : Indeks Pembangunan Gender pada tahun 2016, dengan target sebesar >64, terealisasi 90,13, sehingga capaiannya 140,83%. Cara penghitungan Indeks Pembangunan Gender 2016 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Indeks Pembangunan Gender dipakai untuk mengukur angka rata-rata pencapaian kemampuan dasar dengan penyesuaian untuk memperhitungkan ketimpangan gender. IPG diukur dari komponen IPG dan Indikator IPG yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran:

- Tersedianya sarana prasarana pelayanan peningkatan kapasitas perempuan di bidang pembangunan.
- Kesadaran masyarakat akan pentingnya Pengarus Utamaan Gender.

Sasaran tersebut dicapai melalui program-program adalah : Program Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2. Kekerasan Anak yang tertangani

Pada tahun 2016 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani sebanyak 50 kasus pengaduan, sedangkan pada tahun 2015 terdapat 17 kasus pengaduan, terjadi peningkatan pengaduan dan

penanganan sebanyak 33 kasus atau 66%, terdapatnya kasus pengaduan ini menunjukkan bahwa semakin tersosialisasinya kegiatan Tim Harapan Kabupaten Purbalingga dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, walaupun sebagian besar pengaduan dilakukan oleh pihak ke tiga atau orang lain/tetangga bukan yang menjadi korban atau keluarganya.

Apabila dibandingkan dengan jumlah keluarga yang ada maka cakupan pengaduan dan penanganan masih relatif kecil, tetapi dari perkembangannya mengalami kenaikan yaitu dari tahun 2014 sebesar 0.006% sedangkan pada tahun 2015 tetap yaitu sebesar 0,006%, kemudian tahun 2015 meningkat menjadi 0,017%.

Jumlah pengaduan dan penanganan kasus tahun 2016 sebanyak 50 kasus yang tersebar di 18 kecamatan.

Kendala yang dihadapi antara lain :

- a. kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- b. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan Tim Harapan dan penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
- c. Kurang dipahaminya Pengarusutamaan Gender (PUG) oleh focal point gender SKPD.
- d. Belum diketahuinya peta kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- e. Masih dijumpai pekerja anak putus sekolah

Strategi Pemecahan Masalah

- a. Melaksanakan sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak melalui pemanfaatan pertemuan/musyawarah lembaga masyarakat
- b. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan Tim Harapan dan cara penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui dialog interaktif bekerjasama dengan lembaga penyiaran Radio Suara Perwira.
- c. Meningkatkan kualitas pelatihan penyusunan perencanaan pembangunan yang responsip gender kepada lembaga pemerintah/SKPD

- d. Melaksanakan pendataan dan membuat peta kekerasan terhadap perempuan dan anak
- e. Meningkatkan jumlah pelatihan pekerja anak putus sekolah

Sasaran 13 : *Meningkatnya Budaya Gemar Membaca*

Hasil evaluasi pada sasaran strategis *Meningkatnya Budaya Gemar Membaca* mendapatkan nilai rata-rata 100% dengan kategori sangat berhasil. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18 *Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Budaya Gemar Membaca*

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	EKSISTING 2015	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN %
Persentase desa memiliki perpustakaan	Persen	23	28	28	100

Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah mendirikan perpustakaan di desa dan kelurahan sejumlah 68 unit dari 224 Desa dan 15 Kelurahan. Tahun 2015 Kabupaten Purbalingga sudah memiliki rintisan perpustakaan desa/kel sejumlah 56 yaitu Panican, Muntang, Jetis, Toyareka, Karangtengah, Karangcengis, Bajong, Cipawon, Kedungjati, Kutawis, Lamuk, Kejobong, Nangkod, Pengadegan, Tumanggal, Kalikajar, Sempor, Penaruban, Bojong, Purbalingga Lor, Purbalingga Kidul, Bancar, Kalikabong, Babakan, Kalimanah Wetan, Sidakangen, Kalitinggar Lor, Kalitinggar Kidul, Prigi, Munjul, Sumingkir, Gembong, Karangbanjar, Beji, Serayu Larangan, Serayu Karanganyar, Sangkanayu, Pengalusan, Pakuncen, Gandasuli, Talagening, Limbasari, Serang, Karangreja, Tlahap Kidul, Bungkanel, Kertanegara, Karangtengah, Karangasem, Adiarsa, Pekiringan, Tamansari, Tunjungmulu, Tajug, Wanogara Kulon

Tahun 2016 ada 12 pendirian perpustakaan desa/kel : Karangmanyar, Kedunglegok, Pangempon, Larangan, Tegalpingen, Kutasari, Mrebet, Gondang, Kalijaran, Rajawana, Makam dan Sumampir.

Hambatan yang dihadapi untuk mencapai Sasaran Meningkatnya Budaya Gemar Membaca antara lain :

- a. Kurangnya pengetahuan tentang pengelola perpustakaan/kel.
- b. Koleksi buku masih sedikit hanya mengandalkan program bantuan dari pemerintah.

Upaya untuk mengatasi hambatan untuk mencapai Sasaran Meningkatnya Budaya Gemar Membaca antara lain :

- Pengelola perpustakaan desa/kelurahan direkrut dari personil yang memiliki kompetensi dibidang perpustakaan.
- Memfasilitasi dengan program silang layan (Koleksi dapat mengajukan pinjaman buku secara kolektif ke perpustakaan kabupaten).
- Mensosialisasikan perintisan pendirian perpustakaan di desa/kelurahan.
- Melakukan inovasi perpustakaan antara lain dengan berkeliling dengan kuda dan motor.

Program untuk mencapai Sasaran Meningkatnya Budaya Gemar Membaca antara lain :

- Gerakan Gemar Membaca yang berisi kegiatan lomba-lomba baik yang bersifat perorangan maupun kelompok masyarakat
- Program Perpustakaan yaitu kegiatan – kegiatan di perpustakaan yang melibatkan masyarakat dengan mengadakan pelatihan-pelatihan utk pemuda, pelajar, perempuan dan UMKM
- Pembinaan Perpustakaan yaitu penyuluhan dan pembinaan pengelolaan perpustakaan

Sasaran 14 : *Meningkatnya Apresiasi Terhadap Budaya Daerah, Pelestarian Benda Cagar Budaya Serta Prestasi Seni*

Hasil evaluasi pada sasaran strategis *Meningkatnya Apresiasi Terhadap Budaya Daerah, Pelestarian Benda Cagar Budaya Serta Prestasi Seni* mendapatkan nilai rata-rata 120,76% dengan kategori sangat berhasil. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.19 *Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Apresiasi Terhadap Budaya Daerah, Pelestarian Benda Cagar Budaya Serta Prestasi Seni*

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	EKSISTING 2015	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN %
Jumlah gedung/ tempat gelar seni	unit	11	11	11	100
Intensitas pementasan seni budaya daerah	Kali	65	65	92	141,53
Rata-rata Capaian Kinerja					120,76

1. Jumlah gedung/ tempat gelar seni

Gedung yang bisa digunakan sebagai tempat pentas seni antara lain:

1. Gedung Korpri dikelola oleh Pengururs Korpri Kabupaten
2. Gedung GSG dikelola oleh Koperasi MAS
3. Gedung Kong Kwan dikelola oleh Yayasan Dharma Mulia
4. GOR Mahesa Jenar dikelola Dinbudparpora
5. Panggung Kesenian Mahesajenar dikelola oleh Dinbudparpora
6. Balai Pertemuan Desa Karangbanjar dikelola oleh pokdarwis Sinar Pesona Karangbanjar.
7. Aula Bumi Perkemahan dikelola oleh Dinbudparpora
8. Aula Hotel Kencana dikelola Hotel Kencana
9. Aula Andrawina dikelola oleh Owabong
10. Aula Kraca Bungur dikelola oleh Purbasari Pancuran Mas
11. Balai Kelurahan Purbalingga Lor dikelola oleh Kelurahan Purbalingga Lor

Secara umum dari 11 gedung / tempat tersebut, baru 1 layak dikatagorikan sebagai gedung kesenian yaitu Panggung Kesenian Mahesa Jenar. Sedangkan gedung yang lain tidak memiliki fasilitas untuk pentas seni. Oleh karena itu untuk memwadahi para seniman dalam mengapresiasi karya seni, perlu dibangun Balai Budaya di Kabupaten Purbalingga.

2. Intensitas pementasan seni budaya daerah

Sejak dilaksanakannya Program Fasilitasi pada Bidang kebudayaan yang diperuntukkan bantuan pentas untuk kelompok kesenian, maka minat kelompok kesenian untuk berapresiasi seni meningkat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya permintaan pentas kesenian oleh kelompok kelompok untuk mementaskan kesenian di berbagai acara salah satunya penyambutan tamu yang berkunjung ke Kabupaten Purbalingga.

Tabel 3.20 Pementasan Seni Budaya Daerah di Kabupaten Purbalingga

No.	Jenis Pentas seni	Lokasi	Keterangan
1	Pentas Apresiasi Seni	Kec.Kemangkong	Program Rutin
2	Pentas Apresiasi Seni	Kec.Bukateja	Program Rutin
3	Pentas Apresiasi Seni	Kec.Kejobong	Program Rutin
4	Pentas Apresiasi Seni	Kec.Kaligondang	Program Rutin
5	Pentas Apresiasi Seni	Kec.Pengadegan	Program Rutin



No.	Jenis Pentas seni	Lokasi	Keterangan
6	Pentas Apresiasi Seni	Kec.Purbalingga	Program Rutin
7	Pentas Apresiasi Seni	Kec.Kalimanah	Program Rutin
8	Pentas Apresiasi Seni	Kec.Padamara	Program Rutin
9	Pentas Apresiasi Seni	Kec.Kutasari	Program Rutin
10	Pentas Apresiasi Seni	Kec. Bojongsari	Program Rutin
11	Pentas Apresiasi Seni	Kec.Mrebet	Program Rutin
12	Pentas Apresiasi Seni	Kec.Bobotsari	Program Rutin
13	Pentas Apresiasi Seni	Kec.Karangreja	Program Rutin
14	Pentas Apresiasi Seni	Kec.Karanganyar	Program Rutin
15	Pentas Apresiasi Seni	Kec.Kertanegara	Program Rutin
16	Pentas Apresiasi Seni	Kec.Karangmoncol	Program Rutin
17	Pentas Apresiasi Seni	Kec.Karangjambu	Program Rutin
18	Pentas Apresiasi Seni	Kec.Rembang	Program Rutin
19	Pentas Apresiasi Seni	Panggung Kesenian Mahesa Jenar	Program Rutin
20	Pentas Apresiasi Seni	Panggung Kesenian Mahesa Jenar	Hari Jadi Purbalingga
21	Pentas Revitalisasi Angguk	Panggung Kesenian Mahesa Jenar	Hari Jadi Purbalingga
22	Pentas Revitalisasi Begalan	Kec .Padamara	Hari Jadi Purbalingga
23	Pentas Revitalisasi Aplang	Kec. Purbalingga	Hari Jadi Purbalingga
24	Pentas Revitalisasi Manongan	Kec. Rembang	Hari Jadi Purbalingga
25	Pentas Revitalisasi Kuda Kepang	Kec.Purbalingga	Hari Jadi Purbalingga
26	Pentas Revitalisasi Dames	Kec.Bojongsari	Hari Jadi Purbalingga
27	Pentas Revitalisasi Ujungan	Kec.Purbalingga	Hari Jadi Purbalingga
28	Pentas Revitalisasi Rodat	Kec.Bobotsari	Hari Jadi Purbalingga
29	Pentas Revitalisasi Lesung	Kec.Kalimanah	Hari Jadi Purbalingga
30	Pentas Wayang Kulit	Kecamatan Kutasari	Inyong Kangen Rika
31	Pentas Wayang Kulit	Kecamatan Mrebet	Inyong Kangen Rika
32	Pentas Wayang Kulit	Kecamatan Karangreja	Inyong Kangen Rika
33	Pentas Wayang Kulit	Kecamatan Kemangkon	Inyong Kangen Rika
34	Pentas Wayang Kulit	Kecamatan Kejobong	Inyong Kangen Rika
35	Pentas Wayang Kulit	Kecamatan Kalimanah	Inyong Kangen Rika
36	Pentas Wayang Kulit	Kecamatan Bobotsari	Inyong Kangen Rika
37	Pentas Wayang Kulit Masal	Pasar Segamas Purbalingga	MURI

No.	Jenis Pentas seni	Lokasi	Keterangan
38	Pentas Wayang Kulit Masal	MTL Soedirman Rembang	Hari Jadi Purbalingga
39	Festival Kuda Kepang	Alun-alun Purbalingga	HUT RI
40	Pentas Kuda Kepang	Kec.Karangreja	HUT RI
41	Pentas Kuda Kepang	Kec.Bukateja	HUT RI
42	Pentas Kuda Kepang	Kec. Kutasari	HUT RI
43	Pentas Kuda Kepang	Ke.Bobotsari	HUT RI
44	Pentas Kuda Kepang	Kec. Purbalingga	HUT RI
45	Pentas Kentongan	Lanud Jendral Soedirman	Penyambutan Tamu
46	Pentas Kentongan	Purbalingga	Penyambutan Tamu
47	Pentas Kentongan	Maesa Jenar	Penyambutan tamu dari pusat
48	Pentas Kentongan	GOR Goentoer	Pembukaan Purbalingga Expo
49	Pentas Kentongan	Kec.Rembang	Penyambutan Tamu
50	Pentas Kentongan	Kec. Purbalingga	Penyambutan Tamu
51	Pentas Kentongan	Kec. Purbalingga	Penyambutan Tamu
52	Pentas Kentongan	Kec.Padamara	Penyambutan Tamu
53	Pentas Kentongan	Kec. Karangjambu	Penyambutan Tamu
54	Pentas Hadroh	Pendopo Kabupaten	Acara Nuzulul Quran
55	Pentas Hadroh	GOR Goentoer	Purbalingga Expo
56	Pentas Hadroh	Alun-alun	Pengajian Akbar
57	Pentas Tari Tradisi	Pendopo Kabupaten	Resepsi HUT RI
58	Pentas Kethoprak	Pendopo Kabupaten	Resepsi Hari Jadi
59	Pentas Tari Tradisi	GOR Goentoer Darjono	Purbalingga Expo
60	Pentas Tari Tradisi	GOR Goentoer Darjono	Purbalingga Expo
61	Pentas Tari Tradisi	GOR Goentoer Darjono	Purbalingga Expo
62	Pentas Tari Tradisi	GOR Goentoer Darjono	Purbalingga Expo
63	Pentas Tari Tradisi	GOR Goentoer Darjono	Purbalingga Expo
64	Pentas Tari Tradisi	GOR Goentoer Darjono	Purbalingga Expo
65	Pentas Tari Tradisi	GOR Goentoer Darjono	Purbalingga Expo
66	Pentas Tari Tradisi	GOR Goentoer Darjono	Purbalingga Expo
67	Pentas Tari Tradisi	GOR Goentoer Darjono	Purbalingga Expo
68	Pentas Tari Tradisi	GOR Goentoer Darjono	Purbalingga Expo
69	Pentas Tari Tradisi	GOR Goentoer Darjono	Purbalingga Expo
70	Pentas Band	GOR Goentoer Darjono	Purbalingga Expo
71	Pentas Band	GOR Goentoer Darjono	Purbalingga Expo
72	Pentas Band	GOR Goentoer Darjono	Purbalingga Expo
73	Pentas Band	GOR Goentoer Darjono	Purbalingga Expo

No.	Jenis Pentas seni	Lokasi	Keterangan
74	Pentas Band	GOR Goentoer Darjono	Purbalingga Expo
75	Pentas Dangdut	GOR Goentoer Darjono	Inyong Kangen Rika
76	Pentas Dangdut	Desa Jompo Kalimanah	Hari Jadi Purbalingga
77	Pentas Dangdut	Desa Tlahab Lor	Hari Jadi Purbalingga
78	Pentas musik	Alun-alun Purbalingga	Inyong Kangen Rika
79	Pentas Barongsai	GOR Goentoer Darjono	Purbalingga Expo
80	Parade Seni Jawa Tengah	Kota Magelang	Hari Jadi Jawa Tengah
81	Pentas Seni Rakyat Angguk	PRPP Semarang	Hari Jadi Jawa Tengah
82	Pentas Dalang Remaja	RRI Purwokerto	Pentas Rutin
83	Pentas Tutar Lisan	TBJT Surakarta	Festival Tutar Lisan
84	Pentas Tari Tradisi	TMII Jakarta	Pentas Nasional
85	Festival Tari Nusantara	TMII Jakarta	Pentas Nasional
86	Pentas Uyon Uyon	Pendopo Kabupaten	Pentas Rutin Dua bulanan
87	Pentas Uyon Uyon	Pendopo Kabupaten	Pentas Rutin Dua bulanan
88	Pentas Uyon Uyon	Pendopo Kabupaten	Pentas Rutin Dua bulanan
89	Pentas Uyon Uyon	Pendopo Kabupaten	Pentas Rutin Dua bulanan
90	Pentas Uyon Uyon	Pendopo Kabupaten	Pentas Rutin Dua bulanan
91	Pentas Uyon Uyon	Pendopo Kabupaten	Pentas Rutin Dua bulanan
92	Pentas Uyon Uyon	Pendopo Kabupaten	Pentas Rutin Dua bulanan

Sasaran 15 : *Meningkatnya Prestasi Kepemudaan dan Olahraga*

Hasil evaluasi pada sasaran strategis *Meningkatnya Prestasi Kepemudaan dan Olahraga* mendapatkan nilai rata-rata 600% dengan kategori sangat berhasil. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.21 *Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Prestasi Kepemudaan dan Olahraga*

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	EKSISTING 2015	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN %
Jumlah prestasi Olahraga Tingkat regional dan Nasional	Orang	2	3	18	600

Olahraga merupakan bagian dari program pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang harus diselenggarakan dengan cara bertahap, berjenjang dan

berkesinambungan mulai dari usia dini hingga dewasa. Meningkatkan prestasi olah raga melalui pembibitan dan pembinaan harus dilakukan secara sistematis dan komprehensif melalui lembaga – lembaga pendidikan sebagai pusat pembinaan dibawah koordinasi masing – masing organisasi olahraga bersama – sama dengan masyarakat demi tercapainya sasaran prestasi yang membanggakan di Tingkat Nasional.

KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Kabupaten Purbalingga, sebagai lembaga yang membina organisasi – organisasi keolahragaan yang berada di wilayah Kabupaten Purbalingga dalam perannya membina atlet dari masing – masing cabang olahraga dan dalam keikutsertaan di event kejuaraan berjenjang mampu menghasilkan atlet – atlet yang berprestasi diberbagai cabang-cabang olah raga.

Tabel 3.22 Perolehan Prestasi Olahraga Tingkat Nasional dalam Event O2SN (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional) untuk jenjang SD, SMP, SMA Tahun 2016

No	Nama	Asal Sekolah	Cabang olah raga	Medali
1	Ardita Prameswari	SDN 1 Bukateja	Catur Putri	1 Emas & 1 Perak
2	Guntur Muhamad	SMPN 1 Rembang	Pencak Silat	1 Emas
3	Bilal Saefulloh	SMPN 3 Purbalingga	Karate	1 Perak
4	Rigi Amelia Febiantika	SMAN 2 Purbalingga	Karate	1 Emas
5	Arifianto Firmansyah	SMAN 2 Purbalingga	Lompat Jauh	1 Perak

Tabel 3.23 Kejuaraan Nasional Karate Pelajar Dekan CUP Tahun 2016

No	Nama	Kelas	Kategori	Medali
1	Nabilla R. D	Kumite + 25 kg	Usia Dini	1 Emas
		Kata Perorangan		1 Perak
		Kata Beregu		1 Perunggu
2	Anita Nurliana	Kumite + 30 Kg	Pra Pemula	1 Emas
		Kata Beregu		1 Perunggu
3	Andra Ayu	Kumite + 30 Kg	Pra Pemula	1 Perak
		Kata Beregu		1 Perunggu
4	Nabila Nathania	Kumite + 25 kg	Usia Dini	1 Perak
5	Bilal Saefulloh	Kumite - 35 kg	Pemula	1 Perak
		Kata Perorangan		1 Emas
		Kata Beregu		1 Perunggu
6	Andra Riza M	Kumite – 40 kg	Pemula	1 Perak

No	Nama	Kelas	Kategori	Medali
		Kata Beregu		1 Perak
		Kata Perorangan		1 Perak
7	Dwie Nurul	Kumite – 63 kg	Cadet	1 Perak
		Kata Beregu		1 Perunggu
8	Rigi Amelia	Kumite – 53 kg	Junior	1 Emas
		Kata Beregu		1 Perunggu
9	Ega Diah	Kumite + 54 kg	Cadet	
		Kata Beregu		1 Perunggu
10	Adelia Nuranisa	Kumite + 35 kg	Pemula	1 Perunggu
11	Anindya Wahyu	Kumite – 54 kg	Cadet	1 Emas
12	Putri Anindya Z	Kumite – 48 kg	Junior	1 Emas
13	Singgih Haryo W	Kumite – 61 kg	Junior	1 Perunggu

Kegiatan O2SN dilaksanakan secara berjenjang dengan peserta siswa SD, SMP dan SM sederajat untuk putra dan putri dengan tahapan seleksi dari sekolah sampai nasional.

Sasaran 17 : *Meningkatnya Investasi dan Kegiatan Ekonomi Masyarakat*

Hasil evaluasi pada sasaran strategis *Meningkatnya Investasi dan Kegiatan Ekonomi Masyarakat* mendapatkan nilai rata-rata 138,38% dengan kategori sangat berhasil. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.24 *Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Investasi dan Kegiatan Ekonomi Masyarakat*

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	EKSISTING 2015	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN %
Pertambahan nilai investasi baru	Juta rupiah	230.000	270.000	480.000	177%
Lama waktu perijinan investasi	Hari	6	5,6	5,6	100%
Rata-rata Capaian Kinerja					138,38

Capaian kinerja tahun 2016 telah melampaui target kinerja yang telah ditetapkan, hal tersebut dapat ditempuh melalui beberapa inovasi antara lain :

1. Pemeliharaan iklim investasi yang tetap kondusif

Langkah ini dilakukan melalui jalinan komunikasi yang harmonis dengan para pengusaha untuk memfasilitasi proses koordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, kunjungan ke perusahaan dalam rangka monitoring dan evaluasi penanaman modal, serta fasilitasi penanganan masalah-masalah usaha.

2. Mengikuti berbagai ajang pameran promosi investasi baik lokal maupun nasional, serta promosi melalui media elektronik (*website*).

3. Meningkatkan kemudahan dan kecepatan pelayanan perizinan melalui :

a. Inovasi Pelayanan Izin Sehati;

Inovasi sehati adalah suatu terobosan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga terhadap permohonan izin, yaitu pelayanan terhadap permohonan izin setengah hari pasti jadi, dengan ketentuan merupakan jenis perizinan yang tidak memerlukan pemeriksaan lokasi dan juga persyaratan permohonan lengkap dan benar.

b. Inovasi Pelayanan Izin Jemput Bola

Inovasi ini dilaksanakan dengan cara mendekatkan pelayanan perizinan ke wilayah, dengan membuka teras perizinan di pasar tradisional dan di wilayah kecamatan.

c. Inovasi Pengiriman Izin Melalui Jasa Pos

Inovasi ini dilaksanakan untuk mengantar izin yang sudah terbit dan belum diambil oleh pemiliknya ke alamat pemohon dengan syarat bahwa izin tersebut sudah selesai dan pemohon sudah menyelesaikan adinistrasinya.

d. Inovasi Layanan Mandiri

Inovasi ini berbentuk penyediaan perangkat komputer dengan sistem *online* yang dapat dipakai langsung untuk mengajukan permohonan izin secara mandiri dan menginformasikan persyaratan-persyaratan yang diperlukan.

Sasaran tersebut dapat dicapai dengan 2 program, yaitu :

a. Program Promosi dan Pemasaran Potensi Daerah serta Fasilitasi Investasi dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal

b. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

Tabel 3.25 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

No	Sektor / Sub Sektor	Jumlah		
		Jml Proyek	Investasi	Naker
1	Tanaman Pangan dan Perkebunan	-	-	-
2	Peternakan	-	-	-
3	Kehutanan	-	-	-
4	Perikanan	-	-	-
5	Pertambangan	-	-	-
6	Industri Makanan	3	1.100.000.000	10
7	Industri Tekstil	-	-	-
8	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	-	-
9	Industri Kayu	1	600.000.000	2
10	Industri Kertas dan Percetakan	-	-	-
11	Industri Kimia dan Farmasi	-	-	-
12	Industri Karet dan Plastik	-	-	-
13	Industri Mineral Non Logam	-	-	-
14	Industri Logam, Mesin dan Elektronik	-	-	-
15	Industri Instrumen Kedokteran Presisi Optik dan Jam	-	-	-
16	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lainnya	-	-	-
17	Industri Lainnya	16	4.176.250.000	73
18	Listrik, gas, dan air	-	-	-
19	Konstruksi	-	-	-
20	Perdagangan dan reparasi	601	201.523.207.226	1.708
21	Hotel dan Restoran	-	-	-
22	Transportasi, Gudang dan Komunikasi	7	6.400.000.000	4
23	Perumahan , kawasan industri, dan Perkantoran	13	178.079.600.000	2
24	Jasa Lainnya	47	30.211.200.000	222
JUMLAH		661	422.090.257.226	2.095

Tabel 3.26 Penanaman Modal Asing (PMA)

No	Sektor/ Sub sektor	TOTAL			
		Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Tenaga Kerja	
				Indonesia	Asing
	Sektor Primer				
1	Tanaman Pangan dan Perkebunan		-		
2	Peternakan		-		
3	Kehutanan		-		

No	Sektor/ Sub sektor	TOTAL			
		Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Tenaga Kerja	
				Indonesia	Asing
4	Perikanan		-		
5	Pertambangan		-		
	Sektor Sekunder				
1	Industri Makanan		-		
2	Industri Tekstil		-		
3	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki		-		
4	Industri Kayu		-		
5	Industri Kertas dan Percetakan		-		
6	Industri Kimia dan Farmasi		-		
7	Industri Karet dan Plastik		-		
8	Industri Mineral Non Logam		-		
9	Industri Logam, Mesin dan Elektronik		-		
10	Industri Instrumen Kedokteran Presisi Optik dan Jam		-		
11	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lainnya		-		
12	Industri Lainnya		4.600.000	1.900	4
	Sektor tersier				
1	Listrik, gas, dan air		-		
2	Konstruksi		-		
3	Perdagangan dan reparasi		-		
4	Hotel dan Restoran		-		
5	Transportasi, Gudang dan Komunikasi		-		
6	Perumahan , kawasan industri, dan Perkantoran		-		
7	Jasa Lainnya		-		
Jumlah		2	4.600.000	1.900	4

Tabel 3.27 Penerbitan Izin dan Realisasi Investasi 2016

Uraian Izin	Total
Reklame	913
IMB	641
HO	772
IUP	1.004
TDP	1.019

Uraian Izin	Total
IUJK	146
Izin Lokasi / Pem Lahan	10
Izin Angkutan / IMPP	22
TDI /IUI	30
IMTP	12
TDUP	51
Realisasi Investasi PMDN	422.072.257.226
PMA (2 unit)	61.199.200.000
Jumlah Investasi	483.271.457.226

Sasaran 18 : *Meningkatnya Daya Saing Pariwisata*

Hasil evaluasi pada sasaran strategis *Meningkatnya Daya Saing Pariwisata* mendapatkan nilai rata-rata 91,30% dengan kategori berhasil. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.28 *Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Daya Saing Pariwisata*

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	EKSISTING 2015	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN %
Jumlah kunjungan wisata	Orang	1.579.000	1.850.000	1.689.179	91,30

Data kunjungan dan pendapatan pada obyek wisata yang ada di Kabupaten Purbalingga baik yang dikelola pemerintah daerah maupun yang dikelola oleh swasta diperoleh dari laporan masing-masing obyek wisata yang dilaporkan ke Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga.

Kendala yang kami hadapi yaitu keterlambatan laporan data dari masing-masing obyek, rendahnya kesadaran beberapa pengelola tempat wisata tentang pentingnya data tersebut.

Sektor pariwisata yang dikelola Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

- Obyek Wisata Goa lawa.
- Monumen Tempat Lahir (MTL) Jendral Soedirman.
- Pendakian Gunung Slamet.
- Petilasan Ardhi Lawet.
- Bumi Perkemahan (Buper) Munjulluhur.
- Wana Wisata Serang.

Tabel 3.29 *Jumlah Wisatawan*

Obyek Wisata	Jumlah Pengunjung		Status Kepemilikan
	Wisman	Wisnus	
Goa Lawa	11	61.112	Pemda
Pendakian Gunung Slamet	16	18.745	Pemda
Wana Wisata Serang	10	10.321	Pemda
WISATA BUDAYA			
MTL. Jend. Soedirman	2	12.778	Pemda
Petilasan Ardi Lawet	-	7.890	Pemda
WISATA BUATAN			
Owabong	9	969.468	BUMD
Sanggaluri Park	-	245.005	BUMD
Kolam Renang Tirta Asri	-	109.797	Swasta
Taman Wisata Pendidikan Purbasari Pancuran Mas	13	134.931	Swasta
Bumi Perkemahan Munjulluhur	-	32.070	Pemda
Taman Usman Janatin	2	86.999	Swasta
Jumlah	63	1.689.116	Swasta

Sasaran 19 : *Meningkatnya Kemandirian dan Daya Saing Industri*

Hasil evaluasi pada sasaran strategis *Meningkatnya Kemandirian dan Daya Saing Industri* mendapatkan nilai rata-rata 85,71% dengan kategori berhasil. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.30 *Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kemandirian dan daya Saing Industri*

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	EKSISTING 2015	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN %
Nilai PDRB Sektor Industri	triliun rupiah	3,9	4,2	3,6	85,71

Kategori Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.

Sasaran 20 : *Memperluas Kesempatan Kerja Yang Layak dan Terlindungi Jaminan Sosial*

Hasil evaluasi pada sasaran strategis *Memperluas Kesempatan Kerja Yang Layak dan Terlindungi Jaminan Sosial* mendapatkan nilai rata-rata 107,80% dengan kategori sangat berhasil. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.31 *Capaian Kinerja Sasaran Memperluas Kesempatan Kerja Yang Layak dan Terlindungi Jaminan Sosial*

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	EKSISTING 2015	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN %
Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	5,13	< 5	4,84	103,30
Rasio Tenaga Kerja dengan upah sesuai UMK	persen	79	80	89,85	112,31
Rata-rata Capaian Kinerja					107,80

1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pembangunan bidang ketenagakerjaan bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan harapan jumlah pengangguran dapat ditekan. Kondisi permasalahan ketenagakerjaan ternyata sangat terkait erat dengan keadaan ekonomi yang berkembang setiap saat.

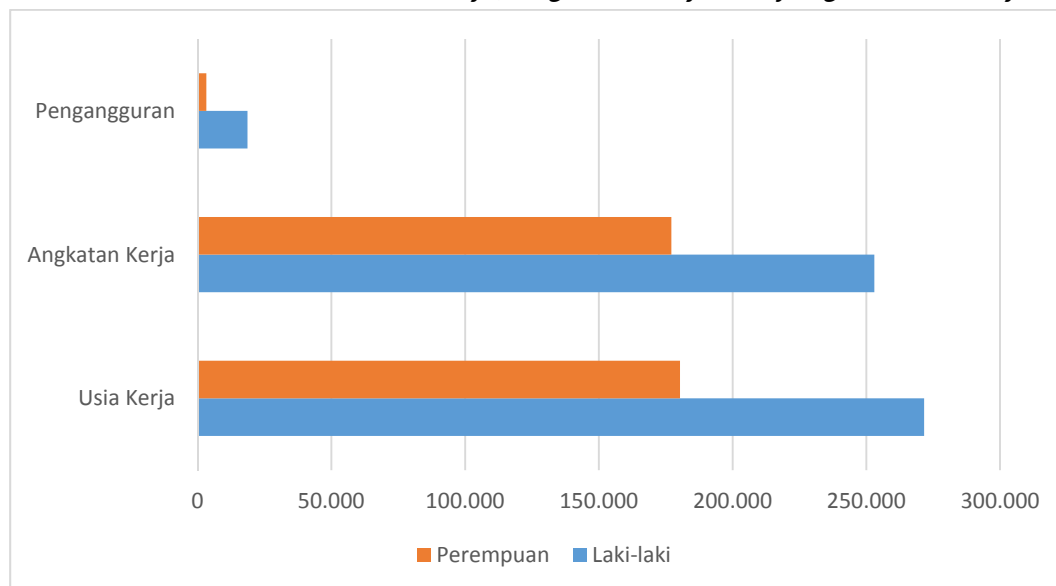
Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan dunia usaha, bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berpengaruh pada terciptanya iklim usaha yang kondusif, yaitu melalui investasi yang ditanamkan oleh investor sehingga akhirnya akan berdampak pada perluasan kesempatan kerja. Sebaliknya menurunnya pertumbuhan ekonomi juga akan berdampak negatif terhadap bidang ketenagakerjaan. Kondisi tersebut mendorong pemerintah dan masyarakat memanfaatkan peluang kerja di luar negeri sebagai salah satu upaya yang cukup strategis guna menangani masalah pengangguran di dalam negeri.

Selain kondisi dunia usaha yang belum kondusif, minimnya informasi lowongan kerja baik dalam maupun luar negeri juga merupakan salah satu kendala dalam upaya untuk menangani masalah pengangguran, disatu sisi pencari kerja tidak mudah untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kompetensinya, disisi lain para pencari kerja sulit mengisi posisi kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan.

Tabel 3.32 *Jumlah Usia Kerja, Angkatan Kerja dan Pengangguran di Kabupaten Purbalingga*

Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Usia Kerja	271.608	180.348	451.956
Angkatan Kerja	252.978	177.119	430.097
Pengangguran	18.629	3.229	21.858
Persentase	6,86	1,79	4,84

Gambar 3.11 *Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja dan yang belum bekerja*



2. Rasio Tenaga Kerja dengan upah sesuai UMK

Upah Minimum Kabupaten Purbalingga yang ditetapkan pada tahun 2016 senilai Rp. 1.522.500,00. Pemerintah Kabupaten Purbalingga membentuk tim pemantau pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2016. Tim terdiri atas unsur Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan serikat pekerja. Dari hasil pemantauan didapat bahwa terhadap 64 perusahaan di Purbalingga baik besar maupun kecil yang tidak mengajukan penangguhan, per Januari wajib membayar upah karyawan sesuai UMK 2016.

Adapun hasil pemantauan UMK 2016 di Kabupaten Purbalingga diperoleh hasil :

1. 64 perusahaan.
2. Jumlah tenaga kerja yang belum dibayar sesuai UMK sebanyak 4.410 orang (10,15%).
3. Jumlah tenaga kerja yang sudah dibayar sesuai UMK sebanyak 39.045 orang (89,85%).

Sasaran 20 : Meningkatnya Kemandirian dan Daya Saing Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro (KUKM)

Hasil evaluasi pada sasaran strategis *Meningkatnya Kemandirian dan Daya Saing Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro (KUKM)* mendapatkan nilai rata-rata 101,8% dengan kategori berhasil. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.33 *Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kemandirian dan Daya Saing Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro (KUKM)*

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	EKSISTING 2015	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN %
Persentase koperasi sehat	persen	59	62	60	96,77
Jumlah usaha mikro bersertifikat / izin	unit	268	293	313	106,83
Rata-rata Capaian Kinerja					101,8

1. Persentasi Koperasi sehat

Dalam pencapaian indikator tersebut urusan koperasi mendasari pada Pasal 31 Ayat (7) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 01/Per/Dep.6/III/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi dilakukan oleh Pelaksana Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi yang dapat ditunjuk dari Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Purbalingga. Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi meliputi aspek :

1. Permodalan;
2. Kualitas aktiva produktif;
3. Manajemen;
4. Efisiensi;
5. Likuiditas;
6. Kemandirian dan pertumbuhan; dan
7. Jatidiri koperasi.

Hasil Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori yaitu :

- a. sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor $80,00 \leq x < 100$
- b. cukup sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor $66,00 \leq x < 80,00$;
- c. dalam pengawasan, jika hasil penilaian diperoleh total skor $51,00 \leq x < 66,00$;
- d. dalam pengawasan khusus, jika hasil penilaian diperoleh total skor $0 < x < 51,00$.

Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun setelah pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2016 menangani 260 koperasi se-Kabupaten Purbalingga baik koperasi aktif maupun tidak aktif. Untuk koperasi aktif terdapat 181 koperasi dimana didalamnya terdapat koperasi sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus. Pada Tahun 2016 capaian kinerja mencapai persentase koperasi sehat sebesar 60% dari Koperasi se-Kabupaten Purbalingga yaitu 156 koperasi. Dibandingkan capaian kinerja tahun 2015 persentase koperasi sehat pada tahun 2016 mengalami kenaikan 1%.

Pertumbuhan ekonomi nasional yang berkembang diharapkan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menumbuhkan UMKM. Seiring kebijakan Pemerintah

Daerah untuk memberdayakan ekonomi rakyat, program pemberdayaan koperasi, dan UMKM terus didorong dan ditingkatkan, karena kelompok usaha ini terbukti mampu memberi kontribusi nyata bagi perekonomian nasional serta memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Program Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Berdasarkan indikator kinerja urusan usaha mikro, kecil dan menengah pada tahun 2016 diperoleh usaha mikro bersertifikat/ijin sebanyak 313 unit. Hasil tersebut melihat pada capaian 2015 dan tahun 2016 yang terdiri dari 268 unit capaian tahun 2015, 50 unit usaha mikro berupa bantuan dana dari APBD Kabupaten untuk memiliki hak atas tanah dalam berusaha, 13 unit sertifikat hak merk pada usaha mikro.

2. Jumlah usaha mikro bersertifikat / ijin

Pelaku Usaha mikro Kecil Menengah di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2016 mulai menunjukkan eksistensinya. Dengan kebijakan Bupati Purbalingga yang mengharuskan setiap ada acara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk menggunakan produk lokal Purbalingga melalui Program Bela Beli Produk Purbalingga yang antara lain mengatur tentang produk, pemasaran maupun penggunaan produk lokal berupa makanan, minuman, pakaian maupun produk kerajinan berbahan baku lokal Purbalingga dan dikerjakan oleh pelaku UMK.

Kesadaran pelaku UMKM terhadap peningkatan kualitas produk terlihat pada peningkatan persentase pengurusan perijinan oleh pelaku UMKM yang mencapai 313 jenis sertifikat baik berupa perijinan usaha, pensertifikatan hak atas tanah, sertifikasi produk maupun sertifikasi keikutsertaan dalam pelatihan-pelatihan baik yang dilaksanakan oleh dinas maupun secara mandiri oleh pelaku UMKM.

Program yang mendukung tercapainya indikator ini adalah :

- a. Program Penumbuhan dan Pengembangan UMKM .
- b. Program Peningkatan Kapasitas Iptek dalam Sistem Produksi Industri Kecil dan Menengah.
- c. Program Peningkatan Kapasitas Iptek.
- d. Program Pengembangan Produk dan Promosi Produk.

Sasaran 21 : Meningkatnya Kemandirian dan Daya Saing Sektor Pertanian

Hasil evaluasi pada sasaran strategis *Meningkatnya Kemandirian dan Daya Saing Sektor Pertanian* mendapatkan nilai rata-rata 87,84% dengan kategori berhasil. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.34 *Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kemandirian dan Daya Saing Sektor Pertanian*

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	EKSISTING 2015	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN %
Nilai PDRB Sektor Pertanian	Triliun rupiah	4,9	5,2	5,09	97,88
Produksi padi	Ton	249.691	252.189	226.707	89,90
Produksi jagung	Ton	39.339	39.732	43.095	108,46
Produksi kedelai	Ton	221	223	134	60,09
Produksi daging	Ton	14.346	14.490	9.856	68,02
Rata-rata capaian					87,84

1. Nilai PDRB Sektor Pertanian

Kategori ini mencakup sub kategori usaha Pertanian yang terdiri atas tanaman pangan, tanaman perkebunan dan jasa pertanian. Lapangan usaha ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2015 lapangan usaha Pertanian masih memberi kontribusi terbesar pada PDRB atas dasar harga berlaku yaitu masih dalam kisaran 30 persen. Masih didominasi oleh sub kategori pertanian dan jasa pertanian yang memberikan andil sampai dengan lebih dari 90 persen, paling besar memberikan sumbangan adalah dari sub-sub kategori tanaman hortikultura tahunan dan lainnya, yaitu dalam kisaran 32 persen. Komoditas tanaman hortikultura tahunan penyumbang terbesar adalah pisang, duku, pepaya dan jeruk. Seperti kita ketahui bahwa hampir disetiap jengkal pekarangan penduduk di wilayah Purbalingga pasti minimal ada satu rumpun tanaman pisang sehingga produksinya cukup tinggi. Komoditas tanaman lainnya yang menyumbang andil terbesar kedua adalah tanaman duku. Duku Purbalingga adalah buah andalan yang banyak tumbuh dan memproduksi di kecamatan Kaligondang, Pengadegan, Padamara, Kejobong dan beberapa kecamatan lainnya. Penyumbang terbesar kedua adalah dari sub-sub kategori tanaman pangan berupa padi, jagung dan kedelai yang mencapai 25,6 persen. Produksi padi terbesar berada di

kecamatan Bukateja dan Kemangkon. Sub-sub kategori peternakan juga memberikan andil cukup tinggi, yaitu sebesar 21,4 persen.

Laju pertumbuhan pada kategori pertanian kehutanan dan perikanan mencapai 5,01 persen. Lebih tinggi laju pertumbuhannya dari tahun sebelumnya yang melaju dengan 3,54 persen. Hal tersebut lebih didukung oleh pertumbuhan sub kategori pertanian dan jasa pertanian yang melaju hingga 5,20 persen. Tanaman pangan adalah sub-sub kategori yang menjadi pemicunya, karena pada tahun sebelumnya hanya melaju tumbuh sebesar 0,36 persen, pada 2015 melejit dengan kecepatan 10,03 persen. Iklim dan penambahan luas tanam menjadikan produksi padi, jagung dan kedelai mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

2. Produksi padi

Pada tahun 2016 luas lahan yang ditanami padi sejumlah 4071,6 ha. Produksi padi mencapai 226.707 ton atau 55,68 kw/ha. Curah hujan yang tinggi mempengaruhi tingkat produktifitas pertanian khususnya padi. Hal tersebut mengakibatkan serangan Organisme Pengganggu Makanan (OPT) yang meningkat. Selain itu intensitas cahaya matahari yang kurang juga mengakibatkan proses fotosintesis kurang optimal sehingga mengurangi produktifitasnya.

Tabel 3.35 *Luasan Serangan Hama*

Jenis OPT	Luas Serangan OPT	
	2015 (ha)	2016 (ha)
Penggerek batang	253	430
Wereng coklat	59	94
Tikus	292	645
Walang sangit	160	428
Penyakit blast	115	248
Hama burung	70	84
Hawar daun bakteri	280	457
Siput murbei	43	68

3. Produksi Jagung

Curah hujan yang tinggi menjadikan berkah kepada para petani jagung. Produksi jagung di Kabupaten Purbalingga menjadi meningkat dari tahun 2015

sebesar 39.732 ton menjadi 43.095 ton pada tahun 2016. Itu disebabkan karena banyaknya lahan yang ditanami jagung pada tahun 2016. Lahan kering yang biasanya tidak ditanami jagung pada musim kemarau menjadi lahan basah dan ditanami jagung.

Tabel 3.36 Luas Lahan Jagung

Kecamatan	Luas Lahan (ha)	
	2015	2016
Bukateja	370	397
Kejobong	174	250
Pengadegan	494	674
Kaligondang	344	375
Padamara	188	267
Kutasari	1.109	1.236
Bojongsari	602	733
Karangreja	954	1.075
Karangjambu	539	824
Karanganyar	89	91
Kertanegara	511	762
Karangmoncol	30	54
Rembang	206	371

4. Produksi Kedelai

Produksi kedelai di Kabupaten Purbalingga tidak mencapai target. Hal tersebut dikarenakan baik luas maupun produktivitasnya tidak dapat mencapai target. Luas lahan yang dapat ditanami tidak mencapai target yang ditentukan. Luas lahan yang ditanami sejumlah 89 ha dari target yang ditentukan sejumlah 174 ha. Sedangkan produktivitasnya hanya 15,07 kw/ha dari target 15,79 kw/ha. Produktivitas rendah karena curah hujan yang tinggi dan intensitas cahaya matahari yang kurang mengakibatkan kurang optimalnya proses fotosintesis rendah. Dan juga minat petani kurang untuk menanam kedelai karena banyaknya curah hujan dan akan menyulitkan pasca panen yang berakibat membusuknya kedelai yang tidak kering.

5. Produksi Daging

Produksi daging di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 sebesar 9.856 ton.

Tabel 3.37 Rekapitulasi Produksi Ternak

Jenis Ternak	Produksi Daging (kg)
Sapi Potong	792.051
Kerbau	579
Kambing	184.609
Domba	54.481
Ayam layer	491.514
Ayam broiler	6.650.462
Ayam buras	1.572.708
Itik	68.016
Kelinci	3.734
Burung puyuh	669
Angsa	237
Entog	33.170
Merpati	3.884

Sasaran 22 : Meningkatnya Kemandirian dan Daya Saing Sub Sektor Perikanan

Hasil evaluasi pada sasaran strategis *Meningkatnya Kemandirian dan Daya Saing Sub Sektor Perikanan* mendapatkan nilai rata-rata 68,11% dengan kategori cukup berhasil. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.38 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kemandirian dan Daya Saing Sub Sektor Perikanan

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	EKSISTING 2015	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN %
Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan	Miliar rupiah	282	295	105	35,59
Produksi Ikan Konsumsi	ton	4.872	4.969	5.001	100,64
Rata-rata capaian kinerja					68,11

1. Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan

Kategori ini mencakup sub kategori usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan, subkategori usaha Kehutanan dan Penebangan Kayu, dan sub kategori usaha Perikanan. Lapangan usaha ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2015 lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih memberi kontribusi terbesar pada PDRB atas dasar harga berlaku yaitu masih dalam kisaran 30 persen.

2. Produksi Ikan Konsumsi

Volume data produksi ikan merupakan Jumlah total dari seluruh produksi ikan per komoditas yang dihitung selama satu tahun.

Tabel 3.39 *Produksi ikan di Kabupaten Purbalingga*

No	Jenis Ikan	Produksi (Ton)
1.	Gurame	1.061,78
2.	Lele Dumbo	2.329,05
3.	Tawes	57,47
4.	Nila	462,68
5.	Bawal	798,85
6.	Patin	146,33
7.	Nilem	132,85
8.	Mas	6,83
9.	Ikan lainnya	5,99
Jumlah		5.001,83

Sasaran 23 : *Terdistribusinya Kebutuhan Pokok Masyarakat Secara Aman, Merata dan Terjangkau*

Hasil evaluasi pada sasaran strategis *Meningkatnya Investasi dan Kegiatan Ekonomi Masyarakat* belum ada realisasinya. Itu dikarenakan belum adanya pasar yang memenuhi standar SNI. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.40 *Capaian Kinerja Sasaran Terdistribusinya Kebutuhan Pokok Masyarakat Secara Aman, Merata dan Terjangkau*

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	EKSISTING 2015	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN %
Pasar yang memenuhi standar SNI	unit	0	0	0	-

Semua pasar milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga sampai saat ini belum memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) dikarenakan untuk mendapatkan SNI 8152 : 2015 tentang Pasar Rakyat perlu adanya syarat – syarat khusus yang wajib di penuhi antara lain :

1. Persyaratan umum seperti lokasi pasar, kebersihan dan kesehatan, keamanan dan kenyamanan.
2. Persyaratan teknis antara lain seperti spesifikasi teknis bangunan dan sarana prasarana yang tersedia.
3. Persyaratan pengelolaan yaitu dalam manajemen pengelolaan pasar. Sedang untuk pasar-pasar Pemda yang saat ini sudah di revitalisasi masih banyak syarat -syarat yang harus di penuhi agar dapat diajukan menjadi Pasar ber SNI.

Program yang mendukung Sasaran Terdistribusinya Kebutuhan Pokok Masyarakat Secara Aman, Merata dan Terjangkau antara lain :

- a. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan
- b. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Sasaran 24 : *Meningkatnya Pelayanan Transmigrasi*

Hasil evaluasi pada sasaran strategis *Meningkatnya Pelayanan Transmigrasi* mendapatkan nilai rata-rata 100% dengan kategori sangat berhasil. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.41 *Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Transmigrasi*

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	EKSISTING 2015	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN %
Persentase calon transmigran dilatih	persen	100	100	100	100

Guna mempersiapkan pemberangkatan 10 Kepala Keluarga (KK) calon transmigran tujuan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengadakan pembekalan dan pelatihan bagi para calon transmigran di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Purbalingga dan salah satu Lembaga Pendidikan Ketrampilan (LPK) yang ada di Purbalingga sesuai dengan keinginan dari peserta yakni pelatihan las sebanyak 6 KK di BLK dan pelatihan perbengkelan/ otomotif sebanyak 4 KK di LPK, pekerjaan itu nanti yang akan menjadi usaha tambahan di lokasi transmigrasi.

Tujuan pelatihan adalah menghasilkan transmigran yang berkualitas, semangat juang tinggi, memiliki jiwa kemandirian, terampil dan kreatif.

Kendala :

1. Target alokasi transmigran ditentukan oleh pemerintah pusat yang relatif sedikit dan tidak ada kepastian volume.
2. Perbedaan kebijakan daerah penerima dengan daerah pengirim, terkait dengan pelaksanaan OTODA.
3. Pendaftar transmigrasi sebagian besar arah minatnya ke Pulau Sumatra dan Kalimantan.

Sasaran 25 : *Meningkatnya Akses dan Konektivitas Wilayah*

Hasil evaluasi pada sasaran strategis *Meningkatnya Akses dan Konektivitas Wilayah* mendapatkan nilai rata-rata 103,54% dengan kategori sangat berhasil. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.42 *Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akses dan Konektivitas Wilayah*

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	EKSISTING 2015	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN %
Persentase jalan dalam kondisi baik	Persen	74,97	75,77	77,56	102,36
Persentase jembatan dalam kondisi baik	Persen	93,04	93,5	96,70	103,42
Persentase lajur jalan minimal 5,5 M	Persen	7,05	10,04	11,45	114,04
Persentase drainase perkotaan	Persen	20,20	21,41	20,20	94,35
Rata-rata Capaian					103,54

a. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik

Panjang jalan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2016 adalah 784,233 kilometer yang terdiri dari 18 Kecamatan. Realisasi capaian indikator kinerja persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik tahun 2016 adalah 608,251 km atau dari target semula 75,77 persen dengan realisasi sebesar 77,56 persen atau 102,36 persen dari target yang ditentukan.

Tabel 3.43 Capaian Indikator Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik Tahun 2016

No.	Kecamatan	Panjang Jalan	Jalan Kondisi Baik (Km)	Persentase
1	Purbalingga	54,385	48,028	88,31
2	Kalimanah	29,989	23,178	77,29
3	Padamara	30,342	25,842	85,17
4	Kutasari	44,448	29,989	67,47
5	Bojongsari	34,997	26,538	75,83
6	Kaligondang	55,696	41,179	73,94
7	Bukateja	57,824	45,902	79,38
8	Kejobong	52,155	38,080	73,01
9	Kemangkon	50,197	43,360	86,38
10	Mrebet	58,946	45,232	76,73
11	Bobotsari	19,236	14,360	74,65
12	Karanganyar	29,775	20,005	67,19
13	Karangreja	41,671	22,448	53,87
14	Karangjambu	45,585	39,585	86,84
15	Kertanegara	17,898	17,898	100,00
16	Karangmoncol	68,244	57,282	83,94
17	Rembang	58,336	42,819	73,40
18	Pengadegan	34,509	26,526	76,87
Jumlah		784,233	608,251	77,56

b. Persentase Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik

Jembatan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2016 sepanjang 2.870,6 meter. Target jembatan dalam kondisi baik pada tahun 2016 sepanjang 2.684,0 meter atau sebesar 93,5 persen. Realisasi capaian indikator kinerja persentase pada tahun 2016 dengan panjang 2.756,5 meter atau setara dengan 96,03 persen dengan demikian realisasi yang dicapai melebihi target yang ditetapkan sebesar lebih dari 2 persen.

Jembatan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2016 sebanyak 273 buah. Target jembatan dalam kondisi baik pada tahun 2016 sebanyak 256 jembatan dalam kondisi baik. Realisasi jumlah jembatan yang kondisinya baik pada tahun 2016 sebanyak 264 buah juga melebihi dari target yang ditetapkan sebanyak 256 buah atau sebesar 96,70 persen dari target yang ditetapkan sebanyak 93,5 pesen jadi ada pelampauan target sebanyak 2,9 persen.

Tabel 3.44 Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik Tahun 2016

No	Uraian	Volume	Taget Tahun 2016	Kondisi		Satuan
				Baik	Rusak	
1	PANJANG	2.870,6	2.684,0	2.756,5	114,1	Meter
			93,5	96,03	3,97	%
2	JUMLAH	273	256	264	9	Buah
			93,5	96,70	3,30	%

c. Persentase Lajur Jalan Minimal 5,5 meter

Panjang jalan di Kabupaten Pubalingga yang berstatus jalan Kabupaten ada 784,233 kilometer. Target jalan yang lebar minimal 5,5 meter pada tahun 2016 ditetapkan sepanjang 78,737 kilometer atau sebesar 10,04 persen. Realisasi jalan yang lebarnya minimal 5,5 meter pada tahun 2016 sepanjang 89,798 kilometer atau bertambah 11,061 kilometer atau terealisasi sebesar 11,45 persen. Hal ini disebabkan adanya kegiatan pelebaran jalan yang kurang dari 5,5 meter menjadi 5,5 meter atau lebih di hampir seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga terutama pada ruas jalan utama yang menghubungkan Ibu Kota Purbalingga dengan kota-kota kecamatan.

Tabel 3.45 Lajur Jalan Minimal 5,5 meter

Panjang Jalan Kabupaten Purbalingga	Target Tahun 2016		Realisasi Tahun 2016	
	Panjang Jalan Minimal 5,5 meter	Persen	Panjang Jalan Minimal 5,5 meter	Persen
784,233	78,737	10,04	89,798	11,45

d. Persentase Drainase Perkotaan

Panjang jalan di Kabupaten Purbalingga yang termasuk daerah perkotaan yaitu meliputi Kecamatan Purbalingga, Kecamatan Bukateja dan Kecamatan Bobotsari sepanjang 131,445 meter. Pada tahun 2015 drainase yang ada di perkotaan Kabupaten Purbalingga sepanjang 26,552 meter atau sebesar 20,20 persen panjang jalan yang ada di daerah perkotaan Kabupaten Purbalingga. Target yang ditetapkan untuk tahun 2016 sepanjang 28,142meter atau sebesar 21,41 persen sedangkan realisasi yang ada pada tahun 2016 mencapai panjang jalan 26,552 meter atau sebesar 20,20 persen. Realisasi yang dicapai pada tahun 2016 besarnya sama dengan tahun 2015 hal ini disebabkan karena pada tahun 2016 yang seharusnya ada penambahan drainase perkotaan dari kegiatan pembangunan trotoar jalan pemuda Bobotsari sepanjang 3.000 meter belum tercapai karena kegiatan tersebut mengalami gagal lelang.

Tabel 3.46 Drainase Perkotaan Tahun 2016

Kinerja Eksisting 2015		Target Tahun 2016		Realisasi Tahun 2016	
Drainase meter	Persen	Drainase meter	Persen	Drainase meter	Persen
26,552	20,20	28,142	21,41	26,552	20,20

Sasaran 26 : *Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Sumberdaya Air Yang Memadai*

Hasil evaluasi pada sasaran strategis *Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Sumberdaya Air Yang Memadai* mendapatkan nilai rata-rata 99,42% dengan kategori sangat berhasil. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.47 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Sumberdaya Air Yang Memadai

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	EKSISTING 2015	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN %
Persentase bangunan pengairan dalam kondisi baik	Persen	38,56	40,8	40,98	100,44
Ketersediaan air baku irigasi	Persen	87,5	88,5	87,09	98,40
Rata-rata capaian kinerja					99,42

1. Persentase Bangunan Pengairan dalam Kondisi Baik

Bangunan pengairan yang ada di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2015 dengan panjang bangunan 417.260 meter, kinerja eksisting pada tahun 2015 bangunan yang memiliki kondisi baik panjangnya ada 160.895 meter atau sebesar 38,56 persen dari keseluruhan bangunan yang ada. Target yang ditetapkan pada tahun 2016 bangunan pengairan dalam kondisi baik meningkat 2,24 persen dari tahun 2015 atau panjang bangunan dari 160.895 meter menjadi 170.242 meter atau bertambah 9,347 meter. Capaian realisasi pada tahun 2016 sepanjang 170.995 meter atau bertambah 10.100 meter dengan besaran persentase 40,98 persen, melampaui target yang ditetapkan sebesar 40,80 persen atau sebesar 106,38 persen. Hal tersebut tidak lepas dari peran kegiatan yang ada pada tahun 2016 sebanyak 30 kegiatan yang mengarah pada perbaikan bangunan saluran irigasi/ bangunan pengairan untuk menopang petani menyediakan air bagi pertanian terutama padi.

Tabel 3.48 Capaian Indikator Persentase Bangunan Pengairan Dalam Kondisi Baik Tahun 2016

Kinerja Eksisting 2015		Target Tahun 2016		Realisasi Tahun 2016	
Panjang Bangunan (meter)	Persen	Panjang Bangunan (meter)	Persen	Panjang Bangunan (meter)	Persen
160.895	38,56	170.242	40,80	170.995	40,98

2. Ketersediaan Air Baku Irigasi

Ketersediaan air baku irigasi untuk mengairi sawah yang ada di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2015 memerlukan debit sekitar 22,991 liter per detik, pada tahun 2015 kinerja eksisting baru terpenuhi sebanyak 20,177 liter/detik hal ini setara dengan 87,50 persen dari kebutuhan air baku irigasi di Kabupaten Purbalingga. Target air baku irigasi pada tahun 2016 direncanakan sebanyak 20,347 liter per detik setara dengan 88,50 persen dari kebutuhan air baku irigasi. Realisasi ketersediaan air baku pada tahun 2016 sebesar 20.478 liter/detik atau 89,07 persen. Hal ini disebabkan sepanjang tahun 2016 terjadi hujan terus menerus sehingga debit air baku yang diperlukan meningkat.

Sasaran 27 : Meningkatnya Akses Aman Air Minum yang Berkelanjutan

Hasil evaluasi pada sasaran strategis *Meningkatnya Akses Aman Air Minum yang Berkelanjutan* mendapatkan nilai rata-rata 99,67% dengan kategori sangat berhasil. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.49 *Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akses Aman Air Minum yang Berkelanjutan*

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	EKSISTING 2015	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN %
Persentase rumah tangga mengakses air bersih	Persen	78,55	83,06	82,78	99,67

Air bersih adalah air yang dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi dan melakukan aktifitas sehari-hari termasuk diantaranya adalah sanitasi. Ditinjau dari segi kualitas, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya kualitas fisik yang terdiri atas pH, kesadahan dan sebagainya serta kualitas biologi dimana air terbebas dari mikroorganisme yang menyebabkan terjadinya penyakit. Agar kelangsungan hidup manusia dapat berjalan lancar, air bersih harus tersedia dalam jumlah yang memadai sesuai dengan aktifitas manusia pada tempat tertentu dan dalam kurun waktu tertentu.

Di Kabupaten Purbalingga rumah tangga yang menggunakan air bersih pada tahun 2016 mencapai 739.298 KK atau 784.699 jiwa dari seluruh penduduk.

Program yang mendukung tersedianya air bersih antara lain :

- 1) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Sederhana (SIPAS)
- 2) Penambahan jaringan pipa air bersih pedesaan
- 3) Adanya program Pamsimas

Sasaran 28 : Meningkatnya Akses Air Limbah Domestik / Rumah Tangga

Hasil evaluasi pada sasaran strategis *Meningkatnya Akses Air Limbah Domestik / Rumah Tangga* mendapatkan nilai rata-rata 101,40% dengan kategori sangat berhasil. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.50 *Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akses Air Limbah Domestik / Rumah Tangga*

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	EKSISTING 2015	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN %
Persentase rumah Tangga terlayani sistem air limbah	Persen	70	77,5	78,58	101,40

Salah satu faktor yang menjadi penilaian rumah layak huni adalah rumah tinggal berakses sanitasi. Kesadaran masyarakat akan pentingnya rumah tinggal berakses sanitasi dasar (mempunyai fasilitas pembuangan air besar/ tinja) sudah mulai membaik. Jumlah rumah di Kabupaten Purbalingga yang mempunyai akses sanitasi dasar pada tahun 2016 adalah sebesar 78,58%.

Pada tahun 2016, desa di Kabupaten Purbalingga mendapatkan program Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI) Kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) guna mendukung penyediaan akses sanitasi dasar masyarakat Purbalingga.



Tabel 3.51 Jumlah Pengguna Jamban

No.	Kecamatan	Jumlah KK	Kemajuan									
			JSP	%	JSSP	%	Sharing	%	BABS	%	Akses	%
1.	Bukateja	21.152	14.138	66,84%	3.994	18,88%	2.640	12,48%	380	1,80%	20.772	98,20%
2.	Pengadegan	11.637	7.539	64,78%	2.753	23,66%	858	7,37%	487	4,18%	11.150	95,82%
3.	Kejobong	14.628	5.957	40,72%	4.158	28,42%	3.706	25,33%	807	5,52%	3.821	94,48%
4.	Bojongsari	16.529	9.667	58,49%	3.101	18,76%	2.625	15,88%	1.136	6,87%	15.393	93,13%
5.	Kaligondang	19.516	12.232	62,68%	1.312	6,72%	3.747	19,20%	2.225	11,40%	17.291	88,60%
6.	Purbalingga	16.537	10.963	66,29%	1.902	11,50%	1.877	11,35%	1.795	10,85%	14.742	89,15%
7.	Karangreja	12.277	6.543	53,29%	1.994	16,24%	1.895	15,44%	1.945	15,84%	10.432	84,97%
8.	Padamara	11.686	6.327	54,14%	3.012	25,77%	577	4,94%	1.770	15,15%	9.916	84,85%
9.	Kalimanah	15.401	9.040	58,70%	39	0,25%	2.312	15,01%	4.010	26,04%	11.391	73,96%
10.	Karanganyar	11.919	6.798	57,03%	1.352	11,34%	431	3,62%	3.338	28,01%	8.581	71,99%
11.	Bobotsari	15.107	8.127	53,80%	832	5,51%	2.386	15,79%	3.762	24,90%	11.345	75,10%
12.	Mrebet	20.970	7.277	34,70%	4.481	21,37%	3.390	16,17%	5.822	27,76%	15.148	72,24%
13.	Kemangkon	18.539	9.400	50,70%	1.197	6,46%	1.856	10,01%	6.086	32,83%	12.453	67,17%
14.	Kutasari	16.393	7.147	43,60%	3.728	22,74%	385	2,35%	5.133	31,31%	11.260	68,69%
15.	Karangmoncol	15.331	7.836	51,11%	1.857	12,11%	523	3,41%	5.115	33,36%	10.216	66,64%
16.	Karangjambu	6.765	2.855	42,20%	336	4,97%	646	9,55%	2.928	43,28%	3.837	56,72%
17.	Kertanegara	9.823	4.358	44,37%	1.012	10,30%	221	2,25%	4.232	43,08%	5.591	56,92%
18.	Rembang	15.141	6.452	42,61%	1.715	11,33%	10	0,07%	6.964	45,99%	8.177	54,01%
		269.351	142.656	52,96%	38.775	14,40%	30.085	11,17%	57.935	21,51%	211.516	78,53%

Keterangan

- JSP : Jamban sehat permanen
 JSSP : Jamban sehat semi permanen
 Sharing : Pemakaian bersama
 BABS : Buang air besar sembarangan

Sasaran 29 : Meningkatkan Akses Pelayanan Persampahan

Hasil evaluasi pada sasaran strategis *Meningkatnya Akses Pelayanan Persampahan* mendapatkan nilai rata-rata 100,50% dengan kategori sangat berhasil. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.52 *Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Akses Pelayanan Persampahan*

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	EKSISTING 2015	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN %
Rasio Timbunan Sampah Terlayani	Persen	59,6	59,7	60	100,5

Sampah telah menjadi permasalahan serius bagi kota-kota yang ada di seluruh dunia. Setiap hari jumlah sampah semakin bertambah seiring dengan pertambahan penduduk dan kemajuan jaman. Dimasa mendatang pemerintah dan pemerintah daerah harus melakukan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah merupakan pelaksanaan kegiatan secara terpadu yang dikelola mulai dari sumber, ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Pendekatan tersebut harus dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan melibatkan masyarakat secara aktif. Peran aktif produsen (industri, distributor dan retailer) dalam melaksanakan pengelolaan sampah produk dan kemasannya secara baik sangatlah diharapkan.

Permasalahan sampah antara lain :

- Semakin banyaknya limbah sampah yang dihasilkan masyarakat.
- Kurangnya tempat sebagai pembuangan sampah sementara.
- Sampah sebagai tempat berkembang dan sarang dari serangga dan tikus.
- Menjadi sumber polusi dan pencemaran tanah, air, dan udara.
- Menjadi sumber dan tempat hidup kuman-kuman yang membahayakan kesehatan.

Secara garis besar, sampah dibedakan menjadi :

- Sampah organik/ basah

Contoh : Sampah dapur, sampah restoran, sisa sayuran, rempah-rempah atau sisa buah dll yang dapat mengalami pembusukan secara alami.

b. Sampah an organik/kering

Contoh : logam, besi, kaleng, plastik, karet, botol, dll yang tidak dapat mengalami pembusukan secara alami.

c. Sampah berbahaya

Contoh : Baterai, botol racun serangga, jarum suntik bekas dll.

Sasaran 28 : *Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Efektif*

Hasil evaluasi pada sasaran strategis *Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Efektif* mendapatkan nilai rata-rata 100% dengan kategori sangat berhasil. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.53 *Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Efektif*

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	EKSISTING 2015	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN %
Persentase ruang terbuka hijau publik	Persen	17,89	18,1	18,1	100

Ruang terbuka hijau berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Kepadatan jumlah penduduk berdampak pada penurunan ruang terbuka hijau. Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup di wilayah perkotaan yang mencakup bumi, air, udara dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, maka diperlukan upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan kawasan-kawasan hijau. Tujuan penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah untuk menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.

Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang harus disediakan oleh Kabupaten/Kota sebesar 30% terdiri dari 20% Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau Private. Kabupaten Purbalingga telah memenuhi

kebutuhan tersebut dengan menyediakan RTH publik sebesar 22,0% dan RTH private 33,1%.

Tabel 3.54 Rekapitulasi Luas Eksisting RTH Perkotaan Purbalingga

Jenis RTH	Luas RTH (Ha)		% RTH terhadap luas kawasan	
1. Privat (pekarangan)		895,5		33,1
2. Publik		595,148		22,0
a. Hutan Kota	5,787		0,2	
b. Lapangan	30,791		1,1	
c. Taman	2,721		0,1	
d. Makam	17,148		0,6	
e. Jalur Hijau	19,921		0,7	
f. Sempadan sungai	518,78		19,2	
Luas Total RTH		1.490,648		55,1

Tabel 3.55 Rekapitulasi Analisis Proyeksi Kebutuhan RTH Perkotaan Purbalingga.

No.	Proyeksi Kebutuhan RTH	Tahun 2017	Tahun 2022	Tahun 2027	Tahun 2032
1.	Perkembangan jumlah Penduduk	19,9781	20,7252	22,046	22,871
2.	Proporsi Penggunaan Ruang	811,695			
3.	Kebutuhan Oksigen (hutan Kota)	89,4	95,3	106,5	142,6

Kesimpulan :

1. Potensi yang ada di Perkotaan Purbalingga sebesar 1.490,648 Ha (55,1%) dari luas wilayah. Luas ini telah memenuhi persyaratan undang-undang tata ruang yang mensyaratkan luas RTH 30% dari luas wilayah.
2. Pengembangan RTH dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif.
3. Secara kualitatif dengan peningkatan intensitas penanaman pohon pada suatu RTH, sedangkan secara kuantitatif dapat dilakukan dengan pengembangan RTH pada lokasi yang berpotensi untuk dikembangkan, terutama pengembangan hutan kota ataupun taman kota, yang secara analisis mempunyai luasan yang kurang dari proyeksi kebutuhan.

4. Pengendalian dalam pengembangan guna lahan perkotaan dilakukan dengan pengaturan KDB (Koefisien Dasar Bangunan) dan KLB (Koefisien Lantai Bangunan) yang telah diatur dalam rencana tata ruang, sehingga ketersediaan ruang terbuka dapat terjamin.
5. Strategi pengembangan dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dilakukan berdasarkan kondisi dan karakter kawasan, sehingga dapat dihasilkan rencana yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada.

Sasaran 31 : *Meningkatnya Cakupan Pelayanan Infrastruktur Permukiman*

Hasil evaluasi pada sasaran strategis *Meningkatnya Cakupan Pelayanan Infrastruktur Permukiman* mendapatkan nilai rata-rata 113,50% dengan kategori sangat berhasil. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.56 *Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Cakupan Pelayanan Infrastruktur Permukiman*

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	EKSISTING 2015	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN %
Luasan kawasan kumuh perkotaan	Persen	32,39	26,9	23,70	113,50

Luas wilayah kumuh yang ada di Kabupaten Purbalingga sebesar 18.436 ha atau 23,70% dari seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga. Luas tersebut menurun dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 25.187,80 ha. Kabupaten Purbalingga telah membentuk Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan/ Desa guna meningkatkan kualitas permukiman dengan Kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Sasaran 32 : *Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Angkutan Serta Fasilitas Perlengkapan Jalan*

Hasil evaluasi pada sasaran strategis *Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Angkutan Serta Fasilitas Perlengkapan Jalan* mendapatkan nilai rata-rata

94,0% dengan kategori berhasil. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.57 *Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Angkutan Serta Fasilitas Perlengkapan*

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	EKSISTING 2015	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN %
Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	persen	4,6	5	-4,7	94,0

Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Kegiatan Pengadaan Fasilitas Pelengkapan Jalan dan Suvey Pencacahan Lalu Lintas menempatkan fasilitas perlengkapan jalan berupa rambu, marka, guardrail, traffic light, warning light dan fasilitas lain pada jalan-jalan yang memerlukan khususnya pada daerah rawan kecelakaan. Selain hal tersebut melalui tugas pokoknya, Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui dinas terkait melaksanakan pengujian kendaraan bermotor untuk mengetahui kelaikan kendaraan, juga melaksanakan perpanjangan ijin trayek. Dengan Kegiatan kegiatan tersebut diharapkan mampu menekan atau menurunkan jumlah angka kecelakaan lalu lintas. Pada tahun 2016 terjadi kenaikan jumlah angka kecelakaan lalu lintas sebesar 4,7 persen. Hal tersebut dikarenakan faktor kelalaian pengendara dan atau faktor alam.

Kendala yang dihadapi :

- Karena faktor alam dengan adanya hujan terus menerus disertai petir sering berakibat kepada kerusakan Alat Petunjuk Instruksi Lampu Lalu Lintas (APILL), baik traffic light maupun warning light sehingga dapat mengacaukan arus lalu lintas termasuk pada pemancar radio.
- Rambu-rambu hilang, sehingga tiap tahun perlu diadakan pengadaan
- Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia, khususnya untuk Pembantu Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lalu Lintas Angkutan Jalan (PPNS LLAJ), staf administrasi maupun staf teknis dibidang perhubungan yang menguasai teknik APILL dan teknik bangunan (konstruksi) sehingga sangat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas.

Upaya pemecahan masalah/solusi :

- a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai melalui usulan untuk mengikuti diklat baik teknis administrasi maupun teknis bidang perhubungan khususnya PPNS LLAJ dan Tehnis APILL.
- b. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang perhubungan

Tabel 3.58 Data Kecelakaan Lalu Lintas

NO	TAHUN	JUMLAH LAKA	KORBAN			RUMAT (Rp.)
			MD	LB	LR	
1	2015	548	119	1	800	432.550.000
2	2016	574	95	1	821	308.100.000
TREN		N	T	TTP	N	T
PERSENTASE 2016		4,7	20,2	0	2,6	28,8

Sumber : satlantas polres purbalingga

Keterangan

N : Naik	Laka : Kecelakaan
T : Turun	MD : Meninggal Dunia
TTP : Tetap	LB : Luka Berat
Rumat : Kerugian Marerial	LR : Luka Ringan

Sasaran 33 : *Meningkatnya Implementasi e-Government dan Keterbukaan Informasi Publik*

Hasil evaluasi pada sasaran strategis *Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Implementasi e-Government dan Keterbukaan Informasi Publik* mendapatkan nilai rata-rata 236% dengan kategori sangat berhasil. Adapaun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.59 *Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Implementasi e-Government dan Keterbukaan Informasi Publik*

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	EKSISTING 2015	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN %
Persentase SKPD yang menerapkan SIM dan memiliki website aktif	persen	25	28	65,96	236

Realisasi capaian indikator kinerja jumlah jenis pelayanan publik secara online tahun 2016 adalah 31 (1 Website Purbalingga, 28 sub domain, 1 Sistem Surat Elektronik, 1 LPSE, 1 sms center) atau 100% dari target yang di tentukan. Capaian tersebut meningkat dibandingkan capaian tahun 2015 yaitu 29 (1 *website* Purbalingga, 26 sub domain, 1 Sistem Surat Elektronik dan 1 LPSE). Realisasi RPJMD 2016 – 2021 cenderung meningkat, realisasi tersebut sudah mencapai target yang ditetapkan RPJMD.

Upaya untuk mengelola sub domain selalu dilakukan dengan mengadakan pelatihan kepada admin SKPD dan mengupdate data setiap saat. Meskipun ada beberapa SKPD yang kurang aktif dalam mengelola *website*-nya.

Daftar sub domain :

1. www.bupati.purbalinggakab.go.id
2. www.wabup.purbalinggakab.go.id
3. www.bapem.purbalinggakab.go.id
4. www.dppkad.purbalinggakab.go.id
5. www.dinbudparpora.purbalinggakab.go.id
6. www.diknas.purbalinggakab.go.id
7. www.dinkes.purbalinggakab.go.id
8. www.dinpertanhut.purbalinggakab.go.id
9. www.dinnakan.purbalinggakab.go.id
10. www.dinpendukcapil.purbalinggakab.go.id
11. www.dpu.purbalinggakab.go.id
12. www.dinhubkominformasi.purbalinggakab.go.id
13. www.bappeda.purbalinggakab.go.id
14. www.dinperindagkop.purbalinggakab.go.id
15. www.bapermasdes.purbalinggakab.go.id
16. www.bkbpp.purbalinggakab.go.id
17. www.bkd.purbalinggakab.go.id
18. www.bpbdd.purbalinggakab.go.id
19. www.blh.purbalinggakab.go.id
20. www.kpad.purbalinggakab.go.id
21. www.kpmpt.purbalinggakab.go.id
22. www.rsud.purbalinggakab.go.id
23. www.ppid.purbalinggakab.go.id
24. www.jdih.purbalinggakab.go.id
25. www.satpolpp.purbalinggakab.go.id

26. www.sekretariatdprd.purbalinggakab.go.id
27. www.dinsosnakertran.purbalinggakab.go.id
28. www.pkk.purbalinggakab.go.id

Tabel 3.60 Sistem Informasi Manajemen di Kabupaten Purbalingga

No	Aplikasi	SKPD
1	Sistem Pendataan Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan
2	SIMDA	DPPKAD
3	SIMDA ASET	DPPKAD
4	SIPKD	DPPKAD
5	SIM-NUPTK	Dinas Pendidikan
6	BIOS	Dinas Pendidikan
7	BOS KITA	Dinas Pendidikan
8	SOP Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Profil Sekolah	Dinas Pendidikan
9	SIM Dapodik	Dinas Pendidikan
10	PAS SMA (Paket Aplikasi Sekolah SMA)	SMA N 2 Purbalingga
11	SENAYAN (Aplikasi Perpustakaan)	SMA N 2 Purbalingga
12	e-learning	SMA N 2 Purbalingga
13	Emis dan Trims	Dinas Pendidikan
14	Software Pembelajaran	SMP N 3 Mrebet
15	Aplikasi Laboratorium Bahasa	Dinas Pendidikan
16	Software DAK SMP 2010	Dinas Pendidikan
17	Software Belajar Interaktif Siswa	SMP N 4 Mrebet
18	Software Pembelajaran Interaktif 2011	SMP N 5 Mrebet
19	Sistem Informasi Pembelajaran	SMP N 3 Karangreja
20	Aplikasi Biosystem Ver. 3.8	Dinas Pendidikan
21	Aplikasi Software Pembelajaran	SMP N 4 Kemangkon
22	Sistem Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan
23	Sistem Informasi Pelayanan Rumah Sakit	RSUD Goeteng Tarunadibrata
24	Sistem Informasi Kepegawaian	RSUD Goeteng Tarunadibrata
25	Sistem Informasi Manajemen Apotik	RSUD Goeteng Tarunadibrata
26	Sistem Surat Elektronik	Dinhubkominfo
27	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Dinpendukcapil
28	Program Aplikasi Informasi	Dinpendukcapil

29	Sistem Penyusunan Data UMKM	Dinperindag
30	Sistem Informasi Perizinan	KPMPT
31	SIM Gaji	DPPKAD
32	Manual Pendapatan Daerah	DPPKAD
33	Sistem Informasi Manajemen Pengawasan	Inspektorat
34	Sinyanmas	Dinpendukcapil
35	SIMPEG	BKD
36	SAPK	BKD
37	Otomasi Layanan Perpustakaan	KPAD

Sasaran 34 : *Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Masyarakat Desa*

Hasil evaluasi pada sasaran strategis *Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Masyarakat Desa* mendapatkan nilai rata-rata 130% dengan kategori sangat berhasil. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.61 *Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Masyarakat*

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	EKSISTING 2015	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN %
Persentase desa dengan BUM Desa sehat	Persen	52	60	78	130

Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang sehat di Kabupaten Purbalingga sejumlah 176 unit. Terbagi menjadi dua kriteria, yaitu 161 unit BUMDesa dan 15 BUMDesa Bersama (eks UPK PNPM MPd). Bantuan kepada Pemerintah Desa untuk Rintisan Desa Berdikari sangat terasa manfaatnya antara :

1. Terbentuknya kelompok masyarakat yang menggerakkan ekonomi lokal dengan memanfaatkan potensi yang ada;
2. Meningkatnya nilai tambah produk yang dipasarkan sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat/ kelompok penerima manfaat;
3. Terbentuknya kelompok usaha ekonomi produktif yang bisa menjadi embrio Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);

4. Menguatnya peran dan fungsi kelembagaan desa dengan melakukan pengawasan dan pembinaan kelompok;
5. Meningkatnya kemampuan masyarakat desa dalam pengambilan keputusan secara partisipatif dengan memperhatikan potensi lokal, dan budaya lokal.

Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan BUMDes bertujuan untuk memberikan fasilitasi dalam rangka pembinaan dan pembentukan BUMDes dan BUMDes Bersama yang ada di kabupaten Purbalingga. Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan BUMDes berupa :

1. Pembinaan terhadap pengurus BUMDes dan BUMDes Bersama.

Tujuan kegiatan pembinaan BUMDes adalah:

- a. Meningkatkan dan memberikan semangat kepada para pengelola BUMDes dalam menjalankan usahanya.
- b. Memberikan dorongan kepada para pengelola BUMDes dan Kepala Desa yang BUMDes-nya belum berjalan secara optimal dalam memanfaatkan potensi usaha di desa yang ada.
- c. Memberikan dorongan kepada para Kepala Desa yang belum membentuk BUMDes, agar memiliki jiwa *enterpreunership*, sehingga dapat segera membentuk BUMDes untuk mengelola potensi yang ada

2. Monitoring dan Evaluasi BUMDes dan BUMDes Bersama

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk melihat perkembangan pengelolaan BUMDes dan BUMDes Bersama baik di desa dengan BUMDes Aktif maupun di desa dengan BUMDes tidak aktif. Monitoring dan Evaluasi dilakukan juga dalam rangka identifikasi permasalahan yang dihadapi pengelola BUMDes dan juga Pemerintah Desa yang belum membentuk BUMDes. Monitoring dan evaluasi dilakukan juga dilakukan terhadap BUMDes Bersama sebagai wujud transformasi UPK PNPM MPd menuju Lembaga Keuangan yang ber-Badan Hukum. Monitoring dan evaluasi dilakukan di desa-desa di wilayah Kabupaten Purbalingga dalam jangka waktu pelaksanaan kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan BUMDes.

Sasaran 35 : *Meningkatnya Kepastian Status dan Pemanfaatan Tanah*

Hasil evaluasi pada sasaran strategis *Meningkatnya Kepastian Status dan Pemanfaatan Tanah* mendapatkan nilai rata-rata 96,4% dengan kategori sangat berhasil. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.62 *Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kepastian Status dan Pemanfaatan Tanah*

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	EKSISTING 2015	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN %
Persentase tanah pemerintah daerah bersertifikat	persen	60	65	62,66	96,4

Jumlah tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang tercatat dalam Neraca Laporan Keuangan Daerah Tahun 2015 adalah 1.216 bidang. Dari jumlah tersebut 707 bidang tanah telah bersertifikat atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga, 55 bidang bersertifikat atas nama Kanwil Dikbud/ Kemen Dikbud (tanah SMP, SMA dan UPT Pendidikan) dan 72 bidang tanah masih dalam proses pensertifikatan. Sejumlah 382 bidang tanah belum diusulkan sertifikatnya.

Sasaran 36 : *Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup*

Hasil evaluasi pada sasaran strategis *Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup* mendapatkan nilai rata-rata 100% dengan kategori sangat berhasil. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.63 *Capaian Kinerja Sasaran Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup*

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	EKSISTING 2015	TARGET 2016	REALISASI 2016	CAPAIAN %
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	47,79	63,5	63,5	100

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan alat untuk mengukur kualitas lingkungan hidup disuatu daerah. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menggabungkan keseluruhan jenis indeks kualitas lingkungan dari semua matra yang mencakup udara, air, hutan, flora, fauna, kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup memberikan informasi sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program pemerintah di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Dari data diatas dapat disimpulkan :

Dari hasil perhitungan serta analisis terhadap PDRB dan kepadatan penduduk, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Meskipun tidak memasukkan semua indikator kualitas lingkungan dalam perhitungan, IKLH cukup memadai untuk menggambarkan kualitas lingkungan hidup secara makro.
- b. IKLH tidak mempunyai korelasi dengan produk domestik regional bruto (PDRB).
- c. IKLH mempunyai korelasi negatif dengan kontribusi pertambangan dan industri pengolahan dalam PDRB.
- d. IKLH mempunyai korelasi negatif dengan kepadatan penduduk di suatu wilayah.
- e. Pencemaran air sungai adalah salah satu masalah lingkungan yang dapat mempengaruhi IKLH suatu wilayah.

Untuk itu, dalam rangka mengatasi pencemaran air sungai perlu dilakukan upaya antara lain :

- a. Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup sebaiknya diprioritaskan pada pengendalian pencemaran air sungai.
- b. Menambah jumlah sampel, terutama untuk kualitas air sungai dan kualitas udara, sehingga IKLH benar-benar mempunyai tingkat akurasi yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Debit air sungai perlu dimasukkan sebagai indikator karena kualitas air sungai juga dipengaruhi oleh debit airnya. Oleh karena itu perlu pengukuran debit air pada sungai-sungai yang diwilayah Kabupaten Purbalingga

E. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Penggunaan biaya guna mencapai sasaran strategis tahun 2016 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016, untuk mencapai 36 sasaran strategis dianggarkan terdapat dalam tabel berikut :



Tabel 3.64 Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	2.673.041.000,00	2.352.742.900,00	88,02
	Program Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	669.953.000,00	287.321.199,00	42,89
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.663.121.000,00	1.399.173.928,00	84,13
	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah di Daerah	706.141.000,00	533.932.500,00	75,61
	Program Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan Daerah	428.581.000,00	393.198.850,00	91,74
	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa	933.666.000,00	760.723.175,00	81,48
	Program Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	861.307.000	705.540.303	81,92
	Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.677.623.000,00	2.443.860.694,00	91,27
	Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.921.260.000	1516651048	78,94
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	17.998.613.000,00	12.891.701.122,00	71,63



SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.818.188.000,00	1.972.331.000,00	69,99
	Program Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan	1.283.027.000,00	1.228.977.232,00	95,79
	Program Pembinaan dan Peningkatan Kualitas SDM Aparatur	2.890.206.000,00	1.531.577.515,00	52,99
	Program Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian	254.472.000,00	188.959.542,00	74,26
	Program Penataan Kelembagaan dan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah di Daerah	1.979.162.000,00	1.516.651.048,00	76,63
	Program Pengembangan Wilayah	10.105.716.000	3.877.193.697	38,37
	Program Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	1.186.307.000	996.530.673	84,00
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	929.209.000,00	850.487.188,00	91,53
	Program Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.647.073.000,00	1.406.181.392,00	85,37
	Program Penelitian dan Pengkajian Daerah	300.000.000,00	287.439.825,00	95,81
	Program Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Administrasi Kearsipan	670.200.000,00	664.394.500,00	99,13



SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Meningkatnya ketaatan terhadap Perda dan Perbup	Program Penyusunan Produk Hukum dan Pembinaan Pelayanan Hukum	906.300.000,00	622.345.050,00	68,67
	Program Pembinaan dan Penegakan Peraturan Daerah	330.503.000,00	227.889.475,00	68,95
	Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat	1.333.564.000,00	1.268.909.700,00	95,15
Menurunnya indeks resiko bencana	Program Penanggulangan Bencana	4.061.475.000,00	3.342.978.424,00	82,31
Meningkatnya paham dan wawasan kebangsaan	Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat	1.046.737.000,00	1.036.926.250,00	99,06
	Program Fasilitasi dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik	607.261.000,00	560.508.300,00	92,30
	Program Pembinaan Wawasan Kebangsaan	2.339.402.000,00	1.541.846.000,00	65,91
	Program Pemberdayaan Sosial dan Keagamaan	5.336.466.000,00	4.768.434.415,00	89,36
Meningkatnya status pangan masyarakat	Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa dan Kelembagaan Masyarakat	1.085.055.000,00	643.402.500,00	59,30
	Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat	986.437.000,00	763.769.346,00	77,43
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa dan Kelembagaan Masyarakat	211.000.000	210.716.745	99,87



SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
	Program Pengembangan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	1.324.180.000,00	1.278.705.230,00	96,57
	Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani	376.539.000,00	358.114.500,00	95,11
	Program Kaji Terap Teknologi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	600.000.000,00	593.511.225,00	98,92
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Program Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni	13.415.000,00	10.090.500,00	75,22
Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	94.911.947.001,00	82.249.238.640,00	86,66
	Program Pendidikan Usia Dini	5.283.000.000,00	4.965.325.532,00	93,99
	Program Pendidikan Dasar	33.582.224.000,00	21.304.285.850,00	63,44
	Program Pendidikan Menengah	5.962.569.000,00	5.460.253.591,00	91,58
	Program Pendidikan Non Formal	711.680.000,00	137.080.850,00	19,26
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	11.319.271.000,00	10.148.139.915,00	89,65
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Program Pengelolaan Obat Publik, Makanan, Minuman dan Perbekalan Farmasi	3.642.715.000,00	3.499.688.147,00	96,07
	Program Pelayanan KIA, Remaja, dan Usia Lanjut	270.492.000,00	261.644.500,00	96,73



SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
	Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan	30.263.834.000,00	22.380.822.961,00	73,95
	Program PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	5.156.622.000,00	4.552.036.015,00	88,28
	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	754.066.000,00	691.770.926,00	91,74
	Program Kesehatan Matra	61.285.000,00	50.504.300,00	82,41
	Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Pelayanan Kesehatan	40.357.869.000,00	36.381.993.678,00	90,15
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	439.267.000,00	436.119.000,00	99,28
	Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan	53.669.690.000,00	43.889.065.541,00	81,78
	Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	13.836.907.000,00	13.692.507.211,00	98,96
	Program Peningkatan Pelayanan pada BLUD	91.441.790.000,00	84.029.092.011,00	91,89
	Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana Pemerintahan	23.766.201.000,00	20.583.498.150,00	86,61
Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	Program Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Institusi KB	77.110.000,00	77.109.800,00	100,00
	Program Peningkatan Pelayanan, Perlindungan dan Pembinaan Kepesertaan KB	1.414.092.000,00	1.342.974.715,00	94,97



SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Program Pemberdayaan Keluarga	355.298.000,00	284.730.600,00	80,14
Meningkatnya pelayanan terhadap PMKS dan kelompok masyarakat rentan lainnya	Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial, Rehabilitasi Sosial, dan Penanganan Keluarga Miskin	1.430.506.000,00	1.324.289.874,00	92,57
Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Program Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.110.875.000	1.024.058.750	92,18
Meningkatnya budaya gemar membaca	Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	1.120.000.000,00	1.110.216.500,00	99,13
Meningkatnya apresiasi terhadap budaya daerah, pelestarian benda cagar budaya serta prestasi seni	Program Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah	6.199.443.000,00	3.249.386.500,00	52,41
Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	1.622.440.000,00	1.066.511.000,00	65,74
	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Pemuda	738.154.000,00	666.105.612,00	90,24
Meningkatnya Investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat	Program Promosi dan Pemasaran Potensi Daerah serta Fasilitas Investasi dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	85.000.000,00	59.918.106,00	70,49
	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	57.750.000,00	57.520.000,00	99,60



SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Meningkatnya daya saing pariwisata	Program Pengembangan Destinasi dan Promosi Pariwisata	2.327.127.000,00	1.400.929.237,00	60,20
Meningkatnya kemandirian dan daya saing industri	Program Pengembangan Sentra Industri Potensial	684.000.000,00	638.989.450,00	93,42
Memperluas kesempatan kerja yang layak dan terlindungi Jaminan Sosial	Program Pembinaan, Peningkatan Ketrampilan dan Penempatan Tenaga Kerja	1.583.716.000,00	1.525.246.095,00	96,31
	Program Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial	143.193.000,00	135.557.177,00	94,67
Meningkatnya kemandirian dan daya saing Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro (KUKM)	Program Penumbuhan, Pengembangan, dan Peningkatan Kualitas Manajemen Koperasi	421.415.000,00	402.561.330,00	95,53
	Program Penumbuhan dan Pengembangan UMKM	957.190.000,00	741.524.676,00	77,47
	Program Peningkatan Kapasitas Iptek dalam Sistem Produksi Industri Kecil dan Menengah	1.130.000.000,00	1.015.039.100,00	89,83
Meningkatnya kemandirian dan daya saing Sektor Pertanian	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Mutu Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	15.844.182.000,00	15.552.747.902,00	98,16
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1.963.837.000,00	1.950.767.269,00	99,33



SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Pemasaran Produk Pertanian	60.000.000,00	58.026.440,00	96,71
	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Peternakan	115.000.000,00	114.780.000,00	99,81
	Program Penyediaan dan Penyempurnaan Data dan Informasi	34.900.000,00	34.100.000,00	97,71
	Program Peningkatan Daya Saing Produk Peternakan	703.345.000,00	564.461.784,00	80,25
	Program Kesehatan Masyarakat Veteriner	443.743.000,00	443.075.500,00	99,85
	Program Pengembangan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	1.324.180.000,00	1.278.705.230,00	96,57
	Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani	376.539.000,00	358.114.500,00	95,11
Meningkatnya kemandirian dan daya saing Sub Sektor Perikanan	Program Kaji Terap Teknologi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	600.000.000,00	593.511.225,00	98,92
	Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	640.033.000,00	629.269.900,00	98,32
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	30.000.000,00	29.636.500,00	98,79
	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	587.430.000,00	577.443.100,00	98,30



SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Terdistribusinya kebutuhan pokok masyarakat secara aman, merata dan terjangkau	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	104.305.000,00	88.255.526,00	84,61
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan	49.291.264.000,00	41.890.822.313,00	84,99
Meningkatnya Pelayanan Transmigrasi	Program Penyiapan dan Fasilitas Ketransmigrasian	226.579.000,00	145.338.700,00	64,14
Meningkatnya akses dan konektivitas wilayah	Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	195.944.136.000,00	166.552.770.664,00	85,00
Meningkatnya keterse-diaan Infrastruktur Sumberdaya Air yang memadai	Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Prasarana Irigasi dan Pengairan	34.617.224.000,00	18.180.206.326,00	52,52
Meningkatnya Akses Aman Air Minum yang Berkelanjutan	Program Optimalisasi dan Pengendalian Pendayagunaan Potensi Geologi, Pertambangan dan Air Tanah	75.000.000,00	12.182.600,00	16,24
Meningkatnya akses air limbah domestik / RT	Program Penataan Lingkungan Permukiman dan Peningkatan Kualitas Sanitasi	6.481.224.000,00	5.919.739.176,00	91,34
Meningkatnya akses pelayanan persampahan	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	3.818.900.000,00	3.418.399.873,00	89,51
Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfa- atan ruang yg efektif	Program Pengembangan dan Penataan Prasarana Perkotaan	11.419.305.000,00	3.536.499.915,00	30,97



SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	250.000.000,00	212.940.000,00	85,18
	Program Penataan dan Pengendalian Ruang Ruang Daerah	840.000.000,00	671.106.179,00	79,89
Meningkatnya kapasitas dan kualitas angkutan serta fasilitas perlengkapan jalan	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	17.689.058.000,00	2.698.331.586,00	15,25
	Program Peningkatan Manajemen dan Fasilitas Lalu Lintas	2.645.818.000,00	2.430.242.790,00	91,85
Meningkatnya imple-mentasi <i>e government</i> dan keterbukaan informasi publik	Program Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi	752.276.000,00	674.903.244,00	89,71
	Program Peningkatan Kualitas Informasi Publik	2.467.769.000	2.059.422.899	83,45
Meningkatnya kualitas pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat desa	Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa dan Kelembagaan Masyarakat	1.085.055.000,00	643.402.500,00	59,30
	Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat	986.437.000,00	763.769.346,00	77,43
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa dan Kelembagaan Masyarakat	211.000.000	210.716.745	99,87
Meningkatnya kepastian status dan pemanfaatan tanah	Program Catur Tertib Pertanahan	842.449.000,00	754.743.270,00	89,59



SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	2.316.809.000,00	2.249.670.954,00	97,10
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1.982.983.000,00	1.975.557.820,00	99,63

Tabel 3.66 Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2016

SASARAN STRATEGIS	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	% Capaian Kinerja	Keterangan
Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah	54.596.866.000,00	37.805.569.331,00	69,24	103,47	Efisien
Meningkatnya ketaatan terhadap Perda dan Perbup	2.570.367.000,00	2.119.144.225,00	82,45	100	Efisien
Menurunnya indeks resiko bencana	4.061.475.000,00	3.342.978.424,00	82,31	192,86	Efisien
Meningkatnya paham dan wawasan kebangsaan	9.329.866.000,00	7.907.714.965,00	84,76	-	-
Meningkatnya status pangan masyarakat	4.583.211.000,00	3.848.219.546,00	83,96	93,53	Efisien
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	13.415.000,00	10.090.500,00	75,22	98,04	Efisien
Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	151.770.691.001,00	124.264.324.378,00	75,22	99,80	Efisien
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	263.660.738.000,00	230.448.742.440,00	87,40	101,59	Efisien
Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	1.491.202.000,00	1.420.084.515,00	95,23	96,74	Efisien
Meningkatnya kesejahteraan keluarga	355.298.000,00	284.730.600,00	80,14	100	Efisien



SASARAN STRATEGIS	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	% Capaian Kinerja	Keterangan
Meningkatnya pelaya-nan terhadap PMKS dan kelompok masyarakat rentan lainnya	1.430.506.000,00	1.324.289.874,00	92,57	56,24	Tidak Efisien
Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1.110.875.000	1.024.058.750	92,18	120,41	Efisien
Meningkatnya budaya gemar membaca	1.120.000.000,00	1.110.216.500,00	99,13	100	Efisien
Meningkatnya apresiasi terhadap budaya daerah, pelestarian benda cagar budaya serta prestasi seni	6.199.443.000,00	3.249.386.500,00	52,41	120,76	Efisien
Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga	2.360.594.000,00	1.732.616.612,00	73,40	600	Efisien
Meningkatnya Investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat	142.750.000,00	117.438.106,00	82,27	138,38	Efisien
Meningkatnya daya saing pariwisata	2.327.127.000,00	1.400.929.237,00	60,20	91,30	Efisien
Meningkatnya kemandirian dan daya saing industry	684.000.000,00	638.989.450,00	93,42	85,71	Tidak Efisien
Memperluas kesempatan kerja yang layak dan terlindungi Jaminan Sosial	1.726.909.000,00	1.660.803.272,00	96,17	107,80	Efisien
Meningkatnya kemandirian dan daya saing Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro (KUKM)	2.508.605.000,00	2.159.125.106,00	86,07	101,80	Efisien
Meningkatnya kemandi rian dan daya saing Sektor Pertanian	20.865.726.000,00	20.354.778.625,00	97,55	87,84	Tidak Efisien
Meningkatnya kemandirian dan daya saing Sub Sektor Perikanan	1.857.463.000,00	1.829.860.725,00	98,51	68,11	Tidak Efisien
Terdistribusinya kebutuhan pokok masyarakat secara aman, merata dan terjangkau	49.395.569.000,00	41.979.077.839,00	84,99	-	-
Meningkatnya Pelayanan Transmigrasi	226.579.000,00	145.338.700,00	64,14	100	Efisien



SASARAN STRATEGIS	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	% Capaian Kinerja	Keterangan
Meningkatnya akses dan konektivitas wilayah	195.944.136.000,00	166.552.770.664,00	85,00	103,54	Efisien
Meningkatnya keterse-diaan Infrastruktur Sumberdaya Air yang memadai	34.617.224.000,00	18.180.206.326,00	52,52	99,42	Efisien
Meningkatnya Akses Aman Air Minum yang Berkelanjutan	75.000.000,00	12.182.600,00	16,24	99,67	Efisien
Meningkatnya akses air limbah domestik / RT	6.481.224.000,00	5.919.739.176,00	91,34	101,40	Efisien
Meningkatnya akses pelayanan persampahan	3.818.900.000,00	3.418.399.873,00	89,51	100,50	Efisien
Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfa- atan ruang yg efektif	11.419.305.000,00	3.536.499.915,00	30,97	100	Efisien
Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	1.090.000.000,00	884.046.179,00	81,11	113,50	Efisien
Meningkatnya kapasitas dan kualitas angkutan serta fasilitas perlengkapan jalan	20.334.876.000,00	5.128.574.376,00	25,22%	94,0	Efisien
Meningkatnya imple-mentasi <i>e government</i> dan keterbukaan informasi publik	3.220.045.000,00	2.734.326.143,00	84,92	236	Efisien
Meningkatnya kualtas pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat desa	2.282.492.000,00	1.617.888.591,00	70,88	130,00	Efisien
Meningkatnya kepastian status dan pemanfaatan tanah	842.449.000,00	754.743.270,00	89,59	96,40	Efisien
Terkendalnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	4.299.792.000,00	4.225.228.774,00	98,27	100	Efisien

